

Salinan dari skripsi fix stakeholder analysis.pdf

by B L

Submission date: 19-Jun-2026 09:43AM (UTC+0700)

Submission ID: 2985840220

File name: Salinan_dari_skripsi_fix_stakeholder_analysis.pdf (9.77M)

Word count: 21680

Character count: 143197

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan gizi merupakan salah satu faktor penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kecukupan gizi memiliki pengaruh langsung terhadap perkembangan fisik, kesehatan, dan kemampuan belajar dari generasi masa mendatang. Di tingkat global, komitmen terhadap peningkatan gizi anak telah menjadi agenda prioritas. UNICEF (2023) menyatakan bahwa, “Perbaikan gizi anak bukan hanya soal kesehatan, tetapi investasi masa depan bangsa. Menurut World Health Organization (WHO, 2022), anak-anak dengan status gizi baik memiliki peluang 33% lebih besar untuk mencapai perkembangan kognitif optimal dan produktivitas ekonomi yang lebih tinggi di masa dewasa. Selain itu, laporan Kementerian Kesehatan (2024) menegaskan bahwa upaya perbaikan gizi juga merupakan bagian integral dari strategi pembangunan manusia Indonesia yang berdaya saing. Anak yang cukup gizi memiliki kemampuan belajar dan produktivitas yang lebih tinggi di masa depan.” Sustainable Development Goals (SDG’s) pada tujuan 2 (Zero Hunger) menargetkan penghapusan kelaparan dan perbaikan gizi dengan estimasi selesai tahun 2030. Di Asia Tenggara, *stunting* dan tingkat kekurangan gizi tetap menjadi masalah serius, dan memiliki dampak jangka panjang pada kemampuan generasi yang lebih muda untuk belajar, produk dan kehidupan.

Tabel 1.1 Gambaran Global & Regional Stunting Anak Sejak Usia Dini

Wilayah	Jumlah Anak Stunting (juta)	Persentase dari Total Global	Catatan
Global (Total)	149,0	100%	Anak usia <5 tahun
Asia Selatan	±56,8	38%	Tertinggi secara global
Sub-Sahara Afrika	±34,4	23%	Terus meningkat sejak 2010

Wilayah	Jumlah Anak Stunting (juta)	Persentase dari Total Global	Catatan
Asia Tenggara	±18,0	12%	Termasuk Indonesia
Amerika Latin & Karibia	±6,0	4%	Tren menurun stabil
Wilayah lain & negara maju	±2,1	1%	Angka sangat rendah

Sumber: WHO (2021), Global Nutrition Report (2021)

Di Indonesia, upaya dalam peningkatan gizi masyarakat telah menjadi agenda strategis yang tertuang dalam berbagai regulasi, diantaranya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. Pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 membahas mengenai rangka percepatan angka stunting dan penyelenggaraan penurunan angka stunting. Regulasi yang menjadi selanjutnya adalah UU No. 18 Tahun 2012 yang membahas mengenai kewajiban Negara dalam mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan pangan. Hingga regulasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 membahas mengenai kebijakan strategis, rencana aksi pangan dan gizi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta bagaimana pendanaan pelaksanaannya. Jika menjabarkan mengenai gizi, maka stunting adalah hal yang erat kaitannya sebagai bentuk patologi kebijakan *zero hunger*. Indonesia mengadopsi dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Penekanan Ketahanan Pangan dan Penurunan Stunting serta RPJMN 2025 – 2029 Agenda Ketahanan pangan dan Program MBG. Perbedaan yang tercantum dalam kedua RPJMN *zero hunger* ini terdapat pada fokus kebijakan utama dan program penunjangnya. Pada RPJMN 2020 – 2024 fokus kebijakannya adalah ketahanan pangan dan penurunan stunting serta program penunjangnya berupa dana desa untuk pangan. Pada RPJMN 2025 – 2029 fokus kebijakannya adalah ketahanan pangan dan transformasi sistem pangan serta kebijakan Makanan bergizi Gratis (MBG) dengan program penunjang diversifikasi pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pada beberapa regulasi yang²⁸ terkait dengan program MBG, terdapat rincian regulasi kunci, antara lain Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan bahwa pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.¹⁵¹ am pasal 60 ayat (1) pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, serta pemenuhan pangan yang bergizi dan aman bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan ini menjadi fondasi bagi hadirnya kebijakan seperti MBG, yang berorientasi pada pemenuhan hak atas pangan bergizi bagi kelompok rentan⁶² khususnya anak sekolah dan ibu hamil. Selanjutnya Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi memberikan arah yang lebih terkoordinasi dalam penyelenggaraan kebijakan pangan dan gizi di Indonesia. Regulasi ini mengamanatkan perlunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi nasional.³⁵ Program MBG merupakan bentuk nyata penerapan prinsip tersebut, karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, penyedia pangan lokal, hingga masyarakat penerima manfaat³² dalam satu sistem pelayanan publik yang terintegrasi. Kemudian, untuk Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting turut memperkuat urgensi program MBG dalam konteks pembangunan manusia. Peraturan ini menempatkan intervensi gizi sebagai strategi utama dalam menurunkan angka stunting, dengan menekankan perlunya upaya sistematis untuk memastikan¹⁶ supan gizi seimbang sejak masa kanak-kanak hingga usia sekolah. Ada pula Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJMN 2020-2024, fokus utama pemerintah adalah pada ketahanan pangan dan percepatan penurunan stunting, sedangkan pada RPJMN 2025-2029, kebijakan ini berkembang menjadi bagian dari agenda transformasi sistem pangan nasional. Dalam fase inilah program Makan Bergizi Gratis dimasukkan secara eksplisit sebagai strategi prioritas untuk memperkuat ketahanan gizi anak sekolah, mendukung pencapaian target *zero hunger* dari SDG's tujuan ke 2 dan memperluas akses terhadap makanan sehat dan bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat serta menekankan *human capital investment* melalui peningkatan gizi.

²³
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi¹⁰ stunting di Indonesia mencapai 21,6% dari total populasi anak balita. Angka ini menurun dari 24,4% pada tahun 2021 dan 27,7% pada tahun 2019, yang

menunjukkan adanya tren perbaikan. Namun, angka ini masih jauh dari target 14% pada RPJMN. Perbedaan signifikan terlihat antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Beberapa daerah pedalaman di Indonesia memiliki angka stunting di atas 30%, seperti di Nusa Tenggara Timur, Papua, dan sebagian wilayah Sulawesi Tengah dan Pulau Jawa pada beberapa lapisan masyarakat. Ketimpangan tersebut menandakan bahwa akses terhadap makanan bergizi, air bersih, serta layanan kesehatan dan sanitasi belum merata. Ini mencerminkan tantangan besar dalam penanganan stunting yang tidak hanya soal asupan makanan, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, ekonomi, dan infrastruktur layanan publik.

Tabel 1.2 Perkembangan *Stunting* di Indonesia

Tahun	Prevalensi Stunting (%)	Target Nasional RPJMN (%)
2019	27,7	24,0
2020	26,9	21,1
2021	24,4	18,4
2022	21,6	14,0 (target 2024)

Sumber : Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2019–2022, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi di Pulau Jawa sebagai pemilik nilai ketimpangan sosial cukup tinggi di Indonesia juga merupakan salah satu provinsi padat baik dari segi jumlah penduduk maupun jumlah institusi pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, populasi Jawa Timur mencapai lebih dari 41 juta jiwa, menjadikannya provinsi dengan penduduk terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Sebagai wilayah yang terdiri atas 38 kabupaten/kota, Jawa Timur juga memiliki keberagaman karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang sangat kompleks.

Dari segi pendidikan, Jawa Timur memiliki jumlah sekolah yang sangat besar. Berdasarkan data *Dapodikdasm*en (2023), total sekolah dari jenjang TK hingga SMA/SMK mencapai 67.476 unit, dengan 18.995 SD dan 5.103 SMP tersebar di seluruh provinsi. Jumlah ini mencerminkan tingginya beban layanan pendidikan yang harus didukung oleh intervensi kebijakan, terutama yang terkait

dengan gizi dan kesehatan anak usia sekolah. Secara geografis, Jawa Timur terbagi ke dalam tiga kategori utama: kawasan perkotaan seperti Surabaya, Sidoarjo, Malang, kawasan pedesaan daratan seperti Bojonegoro, Nganjuk, Madiun, dan kawasan kepulauan/pesisir seperti Bangkalan, Banyuwangi, dan Pacitan. Wilayah kepulauan seperti Kabupaten Bangkalan wilayah yang cukup menyulitkan akses distribusi layanan, termasuk makanan bergizi, air bersih, dan layanan kesehatan. Kesenjangan pembangunan antarwilayah inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan status gizi antar kabupaten/kota. Di daerah perkotaan, anak-anak relatif memiliki akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi, fasilitas sanitasi, dan layanan kesehatan. Sementara itu, di daerah pedalaman dan kepulauan, anak-anak menghadapi tantangan dalam memperoleh asupan gizi memadai secara berkelanjutan. Selain itu, faktor sosial ekonomi turut memperkuat kerentanan gizi anak di Jawa Timur. Data dari BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di beberapa wilayah seperti Sumenep dan Bangkalan masih di atas rata-rata nasional. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak pada kemampuan keluarga untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak mereka.

Dengan kompleksitas ini, teretuslah program pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang perlu disesuaikan dengan kondisi data di untuk, menghadapi isu publik tersebut. Menurut Badan Gizi Nasional, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Program ini dirancang untuk memberikan akses makanan bergizi satu kali per hari bagi peserta didik ibu hamil, menyusui, dan balita, sekaligus membantu menekan angka stunting. Salah satu tujuan utama MBG adalah untuk memastikan bahwa semua siswa menerima asupan makanan bergizi khususnya di sejumlah bidang yang mencengangkan, dan mendukung pertumbuhan optimal dan pengembangan yang optimal. MBG dirancang untuk mengurangi jumlah pertumbuhan yang terhambat, masalah utama dalam kesehatan masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia mengakui bahwa pendidikan yang baik tidak hanya bergantung pada kualitas pelajaran kelas, tetapi juga pada kesehatan para siswa.

Oleh karena itu, MBG adalah kebijakan yang bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung sumbu keseluruhan. Program ini berfokus tidak hanya pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga pada

kepekaan publik terhadap pentingnya pola gizi yang sehat dan meningkatkan aksesibilitas makanan bergizi di seluruh Indonesia. Pendekatan satu kebijakan untuk seluruh wilayah tidak akan efektif tanpa mempertimbangkan perbedaan topografi, kesiapan infrastruktur, serta kapasitas kelembagaan daerah. Program ini mulai dijalankan pada Januari 2025 dengan menasar 19.5 juta penerima manfaat dengan distribusi nasi, sayur, dan susu. Program ini dirancang untuk dijalankan hingga lima tahun kedepan hingga 2029.

Penerapan MBG di tingkat nasional menghadirkan tantangan, terutama yang berkaitan dengan distribusi makanan, dana dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah telah memberikan pedoman untuk mengimplementasikan program, tetapi masing-masing wilayah memiliki kondisi yang sama sekali berbeda. Ini berarti bahwa menyesuaikan semua pedoman lokal efektif. Secara keseluruhan, MBG adalah bagian integral dari pemerintah Indonesia, keamanan nutrisi dan upaya kesehatan anak sebagai dasar pembangunan berkelanjutan. Program ini bukan hanya solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah gizi, tetapi juga memungkinkan pemerintah maupun masyarakat untuk mengambil langkah besar menuju peningkatan kualitas generasi mendatang.

Meskipun secara nasional kebijakan Makanan Bergizi Gratis (MBG) adalah upaya strategis yang digunakan untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak, namun implementasinya di berbagai daerah menunjukkan tantangan yang beragam. Salah satu tantangan yang cukup besar dihadapi pemerintah adalah pelaksanaan MBG di pulau Jawa. Berdasarkan hasil evaluasi sementara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2025), keberhasilan pelaksanaan MBG sangat dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan infrastruktur dapur umum, sistem distribusi logistik, serta mekanisme pengawasan mutu pangan. Wilayah perkotaan seperti Surabaya dan Bandung relatif memiliki sistem manajemen pangan yang lebih baik, sementara wilayah kepulauan seperti Bangkalan menghadapi kendala geografis, keterbatasan akses bahan pangan segar, serta ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah..

Tabel 1.3 Perbandingan Distribusi Program Makan Bergizi Gratis di Pulau

Jawa Sumber : Portal Kominfo Pulau Jawa

PROVINSI	PERKIRAAN SEKOLAH PENERIMA	PERKIRAAN SISWA PENERIMA	CATATAN UTAMA
Jawa Timur	±100 sekolah	±30.000 siswa	Pelaksanaan bervariasi; Madura, Sidoarjo, Surabaya, dan Banyuwangi termasuk prioritas
Jawa Tengah	±80 sekolah	±25.000 siswa	Fokus di daerah dengan prevalensi stunting tinggi seperti Brebes dan Grobogan
DI Yogyakarta	±30 sekolah	±8.000 siswa	Terpusat di kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul
Jawa Barat	±120 sekolah	±35.000 siswa	Sebagian besar di wilayah utara dan tengah; banyak melibatkan UMKM lokal
DKI Jakarta	±50 sekolah	±15.000 siswa	Sudah mulai sejak 2024 sebagai proyek percontohan
Banten	±40 sekolah	±10.000 siswa	Cakupan masih terbatas, fokus pada wilayah Pandeglang dan Lebak

Menurut data pada tabel 1.3 Jawa Timur merupakan provinsi kedua terbanyak perkiraan sekolah penerima program MBG setelah Jawa Barat. Kondisi ini tidak terlepas dari luasnya cakupan wilayah dan tingginya jumlah peserta didik di tingkat pendidikan dasar. Pada beberapa kabupaten/kota, wilayah seperti Surabaya, Malang, dan Jember menunjukkan angka sekolah terdaftar yang signifikan. Sementara itu, wilayah kawasan Madura yang jarang mendapat eksistensi di tengah masyarakat mengenai kondisinya dalam berbagai kebijakan yang berlaku, Kabupaten Bangkalan sebagai wilayah perbatasan Surabaya dan Madura, juga termasuk dalam, kelompok 15 penerima teratas. Hal ini juga selaras dengan tujuan program MBG yang berfokus pada pemerataan akses gizi

bagi peserta didik, terutama di daerah dengan kerentanan gizi dan tingkat prevalensi stunting yang masih relatif tinggi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024).

Tabel 1.4 Data Dapodikdasmen 15 Jumlah Sekolah Jenjang Negeri dan Swasta Provinsi Jawa Timur

No	Wilayah	Total Sekolah (TK-SMA Sederajat dan SLB)
1	Kota Surabaya	3.826
2	Kab. Malang	3.572
3	Kab. Jember	3.496
4	Kab. Lamongan	3.371
5	Kab. Bojonegoro	2.845
6	Kab. Sidoarjo	2.645
7	Kab. Kediri	2.49
8	Kab. Banyuwangi	2.402
9	Kab. Pasuruan	2.364
10	Kab. Gresik	2.208
11	Kab. Sampang	2.148
12	Kab. Probolinggo	2.119
13	Kab. Sumenep	2.057
14	Kab. Bangkalan	2.043
15	Kab. Tuban	1.991

Sumber : Dapodikdasmen Provinsi Jawa Timur

Program MBG diharapkan menjadi instrument dalam memperkuat sumber daya manusia di Jawa Timur melalui intervensi gizi sejak dini dan mulai terlihat nyata di daerah, salah satunya di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah meresmikan dapur umum bernama SPPG Khusus Kabupaten Bangkalan Kodim 0829 di Jl. Mayjend, Kraton, Bangkalan. SPPG

tersebut langsung beroperasi dan menyiapkan paket makanan bergizi untuk 2.345 penerima manfaat, yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa TK hingga SMP wilayah Kraton. Menariknya, selain sebagai upaya pemenuhan gizi, keberadaan SPPG juga diproyeksikan memberi dampak ekonomi lokal. Hal ini karena bahan pangan yang digunakan sebagian besar diserap oleh hasil produksi petani dan wirausaha lokal, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Degan demikian, program MBG di Bangkalan tidak hanya menyentuh dimensi kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi menguatkan ketahanan ekonomi daerah.

49

Dalam konteks kebijakan publik, keberhasilan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga oleh keterlibatan aktor-aktor lokal yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap pelaksanaannya. Oleh karena itu, pendekatan *Stakeholder Analysis* menjadi penting untuk memahami relasi antara pemerintah, masyarakat, penyedia pangan, dan lembaga pendidikan. (Freeman, 1984; Bryson, 2004; Reed et al., 2009). Teori ini membantu melihat siapa yang menjadi pemegang keputusan utama, siapa yang terdampak, serta bagaimana hubungan antar aktor dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Salah satu aspek penting dalam *Stakeholder Analysis* adalah analisis peran stakeholder, yang bertujuan untuk memahami fungsi, tanggung jawab, dalam kontribusi masing-masing aktor pada implementasi program MBG ini. Dalam kerangka *Stakeholder Analysis*, para aktor dibedakan menjadi *key stakeholder*, *primary stakeholder*, dan *secondary stakeholder*. *Key Stakeholder* adalah pihak-pihak utama yang memiliki kepentingan langsung, tanggung jawab besar, serta pengaruh signifikan terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan. *Primary stakeholder* adalah pihak yang memegang kewenangan, keputusan, dan kekuasaan dalam berjalannya suatu kebijakan. Mereka umumnya memiliki otoritas formal maupun kapasitas pengambilan keputusan strategis. Sementara itu, *secondary stakeholder* adalah pihak yang tidak terlibat langsung dalam operasional, namun memiliki pengaruh, kepedulian, atau dapat terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu keputusan kebijakan. (Bryson, 2004).

Setiap stakeholder memiliki dimensi peran yang berbeda, mulai dari peran formal yang berkaitan dengan posisi resmi dalam organisasi atau lembaga, peran

fungsional yang tercermin dari aktivitas nyata yang dijalankan dalam implementasi program MBG, peran pengaruh yang menunjukkan kapasitas mereka memengaruhi keberhasilan program melalui regulasi, kebijakan, atau pengambilan keputusan strategis, hingga peran sebagai penerima manfaat yang menjadi indikator efektivitas pelaksanaan program. Dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) peran stakeholder menjadi sangat penting dari ketentuan kolaborasi antara berbagai pihak seperti, Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab dalam pengawasan kualitas gizi, perencanaan menu dan evaluasi kesehatan siswa, sementara Dinas Pendidikan berperan dalam koordinasi sekolah dan monitoring pelaksanaan program. Sekolah dan tenaga pendidik bertugas memfasilitasi pelaksanaan di lapangan serta melaporkan kendala yang muncul, sedangkan orang tua memberikan dukungan konsumsi makanan bergizi di rumah. Siswa penerima menjadi pihak yang menilai efektivitas program secara langsung melalui partisipasi mereka, sementara penyedia makanan atau dapur MBG bertanggung jawab memastikan ketersediaan makanan bergizi yang aman dan tepat waktu. Pihak legislatif seperti wakil DPRD, turut memberikan dukungan regulasi, penganggaran, dan pengawasan pelaksanaan program.

18

Berdasarkan gap penelitian yang ada, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pelaksanaan Program Makan bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan dengan pendekatan *Stakeholder Analysis*, mengingat program ini baru saja diresmikan oleh Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, pada Senin, 18 Agustus 2025. Analisis ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana peran, kepentingan, dan pengaruh berbagai aktor terkait, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat sebagai target kebijakan, hingga penyedia pangan dalam implementasi kebijakan MBG. Dengan menggunakan pendekatan *stakeholder analysis*, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi aktor kunci yang menentukan keberhasilan program, hambatan koordinasi antar aktor, serta strategi keterlibatan yang efektif untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

19

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *stakeholder analysis* dalam implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan
2. Siapa aktor kunci yang terlibat dalam kebijakan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bangkalan?
3. Apa kepentingan dan pengaruh yang dimiliki oleh para aktor pemangku kebijakan MBG?
4. Bagaimana pola hubungan serta koordinasi antar stakeholder dalam kebijakan MBG?
5. Apa strategi yang diperlukan untuk mengoptimalkan peran aktor dalam mendukung efektifitas kebijakan MBG?

108

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian mengenai baru berlangsungnya program MBG di Kabupaten Bangkalan, antara lain :

1. Menganalisis implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bangkalan
2. Mengidentifikasi aktor-aktor kunci yang terlibat dalam kebijakan Makan Bergizi Gratis
3. Menelaah kepentingan serta tingkat pengaruh masing-masing stakeholder Kebijakan Makan Bergizi Gratis
4. Mengkaji pola hubungan dan koordinasi yang terbentuk oleh aktor Kebijakan Makan Bergizi Gratis
5. Merumuskan strategi optimalisasi peran stakeholder guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan Kebijakan Makan Bergizi Gratis

46

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian Administrasi Publik, khususnya dalam analisis kebijakan sosial berbasis kesejahteraan masyarakat
2. Menambah perspektif akademik mengenai dinamika aktor dalam implementasi kebijakan berbasis kesejahteraan masyarakat

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah, menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan kualitas perumusan dan pelaksanaan program MBG
2. Bagi pemangku kepentingan (stakeholder) mengenai peran yang dapat dimainkan untuk mendukung keberhasilan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Bangkalan

40

Kondisi umum daerah penelitian dideskripsikan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan wilayah penelitian serta objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Deskripsi wilayah penelitian menjadi penting karena dapat membantu memahami karakteristik lingkungan tempat kebijakan diimplementasikan, baik dari aspek fisik maupun sosial. Latar belakang wilayah yang dideskripsikan dalam penelitian ini meliputi kondisi fisik dan kondisi sosial Kabupaten Bangkalan sebagai lokasi pelaksanaan penelitian.

59

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian paling barat Pulau Madura. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 1.260,14 km² dengan jumlah penduduk yang telah mencapai lebih dari 1,2 juta jiwa. Secara geografis, Kabupaten Bangkalan berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Madura di sebelah selatan dan barat, serta Kabupaten Sampang di sebelah timur. Posisi tersebut menjadikan Bangkalan sebagai wilayah yang memiliki akses strategis karena menjadi penghubung utama antara Pulau Madura dan Pulau Jawa.

132

Keberadaan Jembatan Suramadu sebagai akses utama menuju Pulau Madura turut memberikan pengaruh terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Bangkalan. Kemudahan aksesibilitas tersebut mendorong meningkatnya

mobilitas penduduk, aktivitas ekonomi, serta perkembangan sektor pendidikan dan pelayanan publik. Kondisi tersebut menyebabkan Kabupaten Bangkalan mengalami dinamika sosial yang cukup tinggi dibandingkan beberapa wilayah lain di Pulau Madura.

Selain itu, karakteristik geografis Kabupaten Bangkalan juga menunjukkan adanya variasi kondisi wilayah antara kawasan perkotaan dan kawasan yang masih didominasi aktivitas agraris. Perbedaan karakteristik wilayah tersebut turut memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, akses terhadap layanan publik, serta pola pemenuhan kebutuhan masyarakat, termasuk pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Bangkalan



Sumber : Website resmi Kabupaten Bangkalan pada bangkalankab.go.id

Kabupaten Bangkalan² letaknya berbatasan dengan wilayah Surabaya, dengan batas-batas :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| a) Perbatasan sebelah timur | : Kabupaten Sampang |
| b) Perbatasan sebelah barat | : Selat Madura |
| c) Perbatasan sebelah selatan | : Selat Madura |
| d) Perbatasan sebelah utara | : Laut Jawa |

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Bangkalan ini ± 126.014 Ha dengan penggunaan lahan 1.260 Ha pada sektor pertanian. Penggunaan wilayah di Kabupaten Bangkalan terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu :

- Lahan Pertanian Basah (Sawah) : ± 34.674 Ha
- Lahan Pertanian Bukan Sawah (Tegalan/Ladang & Perkebunan)
- Pemukiman dan fasilitas umum
- Kawasan industri dan terpadu

3. Topografi dan Klimatologi

Topografi Kabupaten Bangkalan didominasi oleh dataran rendah dan perbukitan karst dengan ketinggian antara 2-100 mdpl. Kondisi geografis ini memengaruhi distribusi pelaksanaan program MBG, terutama pada wilayah pedalaman dan pedesaan yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas transportasi dan rantai pasok pangan. Secara administrasi, Kabupaten Bangkalan terdiri dari 18 kecamatan dan 281 desa serta kelurahan. Pemerintahannya dipimpin oleh Bupati dan perangkat dinas setempat yang berpusat di area Kecamatan Bangkalan area tengah. Struktur pemerintahan ini turut mempengaruhi pola koordinasi implementasi kebijakan terkait.

50

Tabel 4.1 Data Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Bangkalan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Keterangan Umum
1	Bangkalan	13	Wilayah perkotaan, pusat pemerintahan
2	Burneh	10	Kawasan pendidikan & permukiman padat
3	Arosbaya	20	Wilayah perdesaan, sentra batu kapur
4	Socah	12	Dekat jalur utama Suramadu

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Keterangan Umum
5	Kamal	10	Pelabuhan utama menuju Surabaya
6	Labang	11	Kawasan penyangga Suramadu
7	Kwanyar	16	Perdesaan, akses sedang
8	Modung	18	Perdesaan pesisir
9	Blega	23	Wilayah sub-urban, pasar besar tradisional
10	Konang	20	Daerah pertanian dan perbukitan
11	Tanah Merah	17	Perdesaan berkembang
12	Galis	15	Sentra pertanian
13	Geger	20	Wilayah perbukitan, akses terbatas
14	Kokop	14	Daerah terpencil dengan sebaran desa luas
15	Tanjung Bumi	18	Sentra kerajinan tenun khas Madura
16	Sepulu	18	Wilayah pesisir utara
17	Klampis	13	Wilayah perdesaan
18	Tragah	13	Kawasan agraris

Sumber : <https://bangkalankab.bps.go.id/id>

4. Demografi

Kondisi demografi menjadi salah satu aspek penting dalam menggambarkan karakteristik dasar suatu wilayah karena berkaitan dengan potensi sumber daya manusia, kebutuhan pelayanan publik, serta arah pembangunan daerah. Jumlah penduduk tidak hanya menunjukkan besarnya populasi yang berada pada suatu wilayah, tetapi juga dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga program kesejahteraan sosial yang diselenggarakan pemerintah. Oleh karena itu, analisis kondisi kependudukan menjadi bagian yang relevan dalam memahami konteks implementasi suatu kebijakan publik.

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator demografi yang penting dalam menggambarkan kondisi suatu wilayah karena berkaitan dengan kebutuhan pelayanan publik, penyediaan infrastruktur, serta arah pembangunan daerah. Besarnya jumlah penduduk juga menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kondisi kependudukan menjadi aspek yang perlu dipahami untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik daerah penelitian.

Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dibandingkan beberapa wilayah lain di Pulau Madura. Berdasarkan data kependudukan terbaru, jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 1.059.682 jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bangkalan termasuk wilayah dengan tingkat aktivitas sosial dan kebutuhan pelayanan publik yang cukup tinggi seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung.

Peningkatan jumlah penduduk tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena akan memengaruhi kebutuhan masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Pertumbuhan jumlah penduduk juga dapat berdampak pada meningkatnya kebutuhan penyediaan fasilitas pendidikan, layanan

kesehatan, pemenuhan pangan, kesempatan kerja, serta program perlindungan s¹²⁶ yang lebih merata dan tepat sasaran. Dalam konteks pembangunan manusia, jumlah penduduk⁹⁶ yang besar dapat menjadi potensi apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang baik, namun juga dapat menjadi tantangan apabila tidak diimbangi dengan pemerataan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Secara demografis, jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan yang telah melampaui satu juta jiwa menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki cakupan masyarakat penerima kebijakan yang cukup luas dan beragam. Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan karakteristik wilayah antarkecamatan menyebabkan kebutuhan masyarakat juga menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan publik memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan l⁴² dis¹³¹ kependudukan agar implementasi program dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kondisi jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan menjadi relevan untuk melihat urgensi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Besarnya jumlah penduduk, terutama kelompok usia sekolah sebagai sasaran program, un¹³¹ menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap kebijakan pemenuh¹⁰⁵ gizi tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara jangka panjang. Dengan demikian, kondisi demografi Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu dasar yang mendukung pentingnya implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis sebagai bentuk intervensi sosial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

b. Kepadatan Penduduk Kabupaten Bangkal⁷

Kepadatan penduduk merupakan salah satu indikator demografi yang digunakan untuk menggambarkan persebaran jumlah penduduk terhadap luas wilayah tertentu. Indikator ini penting karena dapat menunjukkan tingkat tekanan penduduk terhadap ruang, kebutuhan penyediaan layanan publik, serta tingkat konsentrasi aktivitas sosial dan ekonomi pada suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat kepadatan

penduduk, maka semakin besar pula kebutuhan terhadap infrastruktur, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, serta berbagai bentuk pelayanan publik lainnya.

26

Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik kepadatan penduduk yang cukup bervariasi antarwilayah. Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan pada pertengahan tahun 2025 tercatat sebanyak 1.059.682 jiwa dengan luas wilayah sekitar 1.302,64 km². Berdasarkan data tersebut, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bangkalan diperkirakan mencapai sekitar 813 jiwa/km². Perhitungan ini menunjukkan bahwa setiap satu kilometer persegi wilayah Kabupaten Bangkalan dihuni oleh sekitar 813 penduduk.

Apabila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bangkalan menunjukkan kecenderungan meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang terjadi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, kepadatan penduduk Kabupaten Bangkalan tercatat sekitar 801 jiwa/km², sehingga kondisi tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan konsentrasi penduduk di wilayah tersebut.

Meskipun demikian, distribusi kepadatan penduduk di Kabupaten Bangkalan tidak tersebar secara merata pada seluruh kecamatan. Wilayah pusat pemerintahan dan kawasan yang memiliki akses ekonomi serta infrastruktur lebih baik cenderung memiliki kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Berdasarkan data kecamatan, Kecamatan Bangkalan menjadi wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu sekitar 2.464,77 jiwa/km² pada tahun 2024. Sebaliknya, beberapa wilayah dengan luas area yang lebih besar memiliki tingkat kepadatan yang relatif lebih rendah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya konsentrasi aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik yang lebih dominan pada kawasan pusat kabupaten.

Dalam konteks penelitian ini, kondisi kepadatan penduduk menjadi aspek yang relevan untuk dianalisis karena berkaitan dengan

pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan. Wilayah dengan tingkat kepadatan yang lebih tinggi cenderung memiliki jumlah sasaran program yang lebih besar sehingga memerlukan kapasitas distribusi, koordinasi, serta penyediaan layanan yang lebih optimal. Di sisi lain, perbedaan tingkat kepadatan antarwilayah juga dapat memengaruhi pola implementasi kebijakan agar pelaksanaan program dapat menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat pada masing-masing wilayah.

c. Mata Pencarian Penduduk

Mata pencarian penduduk merupakan salah satu indikator demografi yang penting untuk menggambarkan struktur ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Struktur mata pencarian menunjukkan bagaimana penduduk memperoleh pendapatan serta menggambarkan sektor ekonomi yang menjadi penopang utama aktivitas masyarakat. Selain itu, kondisi mata pencarian juga dapat digunakan untuk melihat tingkat produktivitas masyarakat, pola distribusi tenaga kerja, serta potensi ekonomi daerah yang dapat mendukung pembangunan.

Dalam konteks pembangunan daerah, jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat memiliki hubungan dengan tingkat kesejahteraan, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, serta daya dukung terhadap berbagai program pemerintah. Perubahan struktur mata pencarian juga sering menunjukkan adanya perkembangan sosial dan ekonomi, terutama pada wilayah yang mulai mengalami pergeseran dari sektor primer menuju sektor perdagangan dan jasa.

Kabupaten Bangkalan secara umum masih menunjukkan karakteristik ekonomi yang cukup kuat pada sektor primer. Aktivitas ekonomi masyarakat masih banyak ditopang oleh sektor pertanian dalam arti luas yang mencakup pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Namun demikian, perkembangan kawasan perkotaan dan meningkatnya aktivitas ekonomi turut mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, industri, serta pekerjaan lainnya di luar sektor pertanian.

2

5. Kondisi Sosial Masyarakat

a. Pendidikan

Ciri khas manusia adalah kemampuannya dalam mendidik dan juga dididik melalui berbagai aktivitas pendidikan. Dalam masyarakat, pendidikan termasuk ke dalam hal yang tidak terpisahkan dengan tumbuh kembang manusia. Pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kondisi sosial masyarakat karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola pikir, serta kemampuan masyarakat dalam menerima dan merespons berbagai kebijakan publik. Di Kabupaten Bangkalan, kondisi pendidikan masih menunjukkan tantangan dalam aspek capaian pendidikan masyarakat.

2

Tabel 4.2 Kondisi Pendidikan Penduduk Kabupaten Bangkalan
Tahun 2024

No.	Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Tidak/Belum Sekolah	383.800	36,83
2	Belum Tamat SD	91.790	8,81
3	Tamat SD	371.690	35,67
4	Tamat SMP	80.560	7,73
5	Tamat SMA	83.100	7,97
6	Diploma I–II	1.168	0,11
7	Diploma III	3.418	0,33
8	Sarjana (S1)	24.820	2,38

No.	Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
9	Magister (S2)	1.567	0,15
10	Doktor (S3)	131	0,01

Sumber : Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah oleh Katadata Insight Center, 2024.

Berdasarkan Tabel 4.2, tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Bangkalan masih didominasi oleh kelompok pendidikan dasar dan penduduk yang belum mengenyam pendidikan formal. Kelompok terbesar berasal dari kategori tidak/belum sekolah sebanyak 383.800 jiwa (36,83%), diikuti tamat SD sebanyak 371.690 jiwa (35,67%). Sementara itu, penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atas mencapai 83.100 jiwa (7,97%) dan pendidikan tinggi (Diploma hingga S3) masih berada pada proporsi yang relatif kecil.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2025 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bangkalan mencapai 6,15 tahun, yang menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas menempuh pendidikan hingga sekitar kelas VI sekolah dasar. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 12,09 tahun, yang menggambarkan bahwa anak usia sekolah di Bangkalan memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga jenjang menengah atas apabila kondisi sosial dan ekonomi mendukung. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangkalan tercatat sebesar 68,15 poin pada tahun 2025 yang masih mencerminkan perlunya penguatan pembangunan pada sektor pendidikan dan kualitas hidup masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur pendidikan masyarakat Kabupaten Bangkalan masih didominasi oleh pendidikan dasar. Hal ini dapat memengaruhi tingkat literasi masyarakat dalam memahami informasi publik, termasuk kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan dan pemenuhan gizi. Dalam konteks implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi pendidikan menjadi faktor sosial yang berpotensi

memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap tujuan program, pola penerimaan kebijakan, serta dukungan keluarga terhadap pemenuhan gizi anak.

b. Struktur Sosial dan Budaya

Kondisi sosial masyarakat merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menganalisis implementasi suatu kebijakan publik karena berkaitan dengan karakteristik, kebiasaan, dan pola penerima masyarakat terhadap program yang dijalankan pemerintah. Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi sosial masyarakat menjadi penting untuk dipahami karena dapat memengaruhi proses pelaksanaan kebijakan, tingkat partisipasi masyarakat, serta efektivitas pencapaian tujuan program.

Kabupaten Bangkalan memiliki karakteristik sosial yang cukup kuat, salah satunya ditunjukkan melalui tingginya tingkat religiusitas masyarakat. Berdasarkan data kependudukan, sebesar 99,51% penduduk Kabupaten Bangkalan memeluk agama Islam. Kondisi tersebut membentuk pola kehidupan masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di lingkungan sekitar. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, nilai tersebut turut memengaruhi cara masyarakat menerima perubahan, termasuk terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Selain aspek religiusitas, budaya konsumsi masyarakat juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan MBG. Masyarakat Madura secara umum memiliki karakteristik konsumsi yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan kebiasaan lokal yang berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Pada beberapa wilayah, konsumsi pangan tidak hanya berfokus pada beras tetapi juga memanfaatkan bahan pangan lokal seperti jagung sebagai alternatif sumber karbohidrat. Selain itu, terdapat preferensi makanan tertentu yang dapat memengaruhi pola konsumsi rumah tangga dan penerimaan terhadap menu yang diberikan dalam program pemerintah.

Pemahaman terhadap kondisi sosial dan budaya tersebut menjadi penting karena pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berkaitan dengan distribusi makanan, tetapi juga dengan kesesuaian program terhadap karakteristik masyarakat penerima. Penyesuaian menu, variasi bahan

pangan, serta pendekatan implementasi yang mempertimbangkan kebiasaan konsumsi masyarakat dapat mendukung keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan gizi peserta.

Namun demikian, kondisi sosial masyarakat Kabupaten Bangkalan saat ini juga mengalami perkembangan seiring meningkatnya urbanisasi, akses informasi, dan perubahan pola hidup masyarakat. Dalam penelitian ini, sampel yang dipilih peneliti berada pada wilayah Kabupaten Bangkalan bagian pusat yang memiliki karakteristik sosial yang relatif lebih modern⁸¹ dibandingkan wilayah lainnya. Masyarakat pada wilayah tersebut cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan publik, informasi digital, serta pola konsumsi yang lebih beragam.

¹² c. Kondisi Kesehatan dan Gizi⁵³

Kesehatan dan gizi merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kualitas sumber daya manusia¹²⁴ kondisi sosial masyarakat di suatu wilayah. Kondisi kesehatan yang baik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan layanan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan gizi, pola konsumsi masyarakat, kondisi ekonomi, lingkungan, serta tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan. Dalam konteks pembangunan, peningkatan status kesehatan dan gizi menjadi perhatian utama karena memiliki keterkaitan langsung dengan produktivitas, kualitas pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

²⁵
Salah satu permasalahan gizi yang masih menjadi perhatian pemerintah di Indonesia adalah stunting, yaitu²² kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam jangka waktu panjang. Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan⁹³ kognitif, kemampuan belajar, serta produktivitas pada masa mendatang. Oleh karena itu, penanganan stunting menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional melalui berbagai intervensi, termasuk penguatan program pemenuhan gizi.

Dalam konteks daerah, Kabupaten Bangkalan menunjukkan perkembangan yang cukup positif dalam upaya perbaikan⁹⁸ status gizi masyarakat. Berdasarkan data yang tersedia, prevalensi stunting di Kabupaten Bangkalan

mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 26,2% pada tahun 2022 menjadi 10,2% pada tahun 2023. Penurunan tersebut menunjukkan adanya upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya pada kelompok anak. Capaian ini juga mencerminkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi dan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.

Meskipun demikian, penurunan prevalensi stunting secara umum belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kesehatan dan gizi pada seluruh wilayah di Kabupaten Bangkalan. Perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, akses layanan kesehatan, serta kondisi geografis antarkecamatan dapat menyebabkan distribusi kasus stunting yang tidak merata. Oleh karena itu, analisis terhadap persebaran stunting berdasarkan wilayah menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai daerah yang masih memerlukan perhatian lebih dalam intervensi kesehatan dan gizi. Pemetaan wilayah berdasarkan indikator yang memengaruhi kasus stunting juga dapat membantu mengidentifikasi tantangan spesifik yang dihadapi dalam pelaksanaan program penanganan gizi.

148
Dalam kaitannya dengan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi kesehatan dan gizi masyarakat Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu dasar penting dalam melihat urgensi pelaksanaan kebijakan tersebut. MBG hadir sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah yang tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pangan peserta didik, tetapi juga mendukung perbaikan status gizi dan pencegahan masalah kesehatan jangka panjang. Program ini diharapkan dapat memperkuat upaya yang telah dilakukan sebelumnya serta memberikan kontribusi terhadap penurunan angka stunting, terutama pada wilayah yang masih menunjukkan tingkat kerentanan gizi yang relatif tinggi.

Dengan demikian, analisis kondisi kesehatan dan gizi masyarakat tidak hanya diperlukan untuk melihat capaian pembangunan daerah, tetapi juga untuk memahami sejauh mana kebijakan MBG dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Kabupaten Bangkalan.

d. Kondisi Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan

Kondisi ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kapasitas rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat kesejahteraan ekonomi tidak hanya memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan, tetapi juga berhubungan dengan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kualitas konsumsi pangan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, kondisi ekonomi masyarakat menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis implementasi kebijakan publik, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Salah satu indikator yang umum digunakan untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap sumber daya yang mendukung kehidupan yang layak. Dalam konteks pembangunan sosial, kondisi kemiskinan sering kali berkaitan dengan rendahnya kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan gizi, terutama bagi kelompok rentan seperti anak usia sekolah. Keterbatasan ekonomi dapat memengaruhi kualitas dan kuantitas konsumsi pangan yang pada akhirnya berdampak terhadap kondisi kesehatan dan perkembangan anak.

Di Kabupaten Bangkalan, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian. Berdasarkan data terbaru, pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan tercatat sebesar 187,90 ribu orang. Meskipun angka tersebut menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah tersebut masih menggambarkan bahwa sebagian masyarakat Bangkalan berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Selain itu, garis kemiskinan Kabupaten Bangkalan pada tahun 2025 juga mengalami kenaikan sebesar 3,2% dibandingkan tahun 2024, yang menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan minimum yang harus dipenuhi masyarakat untuk mencapai standar hidup layak.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya penurunan kemiskinan yang dilakukan pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah perubahan kondisi ekonomi.

Peningkatan garis kemiskinan juga menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat berhasil keluar dari kategori miskin, kebutuhan ekonomi rumah tangga tetap mengalami tekanan sehingga berpotensi memengaruhi pola konsumsi dan kualitas pemenuhan kebutuhan keluarga. Dalam situasi seperti ini, rumah tangga dengan kondisi ekonomi terbatas cenderung melakukan penyesuaian pengeluaran, termasuk pada kebutuhan pangan dan gizi.

Kondisi ekonomi dan kemiskinan tersebut menjadi relevan dalam melihat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan. Program MBG dapat dipahami sebagai salah satu bentuk intervensi sosial pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, khususnya bagi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Dengan adanya penyediaan makanan bergizi di lingkungan sekolah, sebagian kebutuhan konsumsi harian anak dapat terbantu sehingga alokasi pengeluaran keluarga dapat lebih optimal untuk kebutuhan lainnya.

Selain memberikan dampak pada rumah tangga penerima manfaat, implementasi MBG juga memiliki potensi untuk memberikan efek ekonomi yang lebih luas. Pengadaan bahan pangan yang melibatkan sumber daya lokal seperti petani, pelaku usaha pangan, dan UMKM dapat menciptakan perputaran ekonomi di tingkat daerah. Dengan demikian, pelaksanaan MBG tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan pemenuhan gizi, tetapi juga berpotensi mendukung pemberdayaan ekonomi lokal apabila pelaksanaannya dilakukan dengan memanfaatkan rantai pasok daerah secara optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, aspek ekonomi dan kemiskinan menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menganalisis implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bangkalan, karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh distribusi bantuan pangan, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan dalam menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

4.1.2 Penyajian Data

Pada bagian ini disajikan data hasil penelitian yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian mengenai Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di

Kabupaten Bangkalan. Penyajian data dilakukan secara deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan kondisi empiris yang ditemukan di lapangan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Data yang disajikan berasal dari proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Penyajian hasil penelitian pada bagian ini diarahkan untuk menampilkan fakta dan kondisi yang terjadi di lapangan tanpa melakukan interpretasi maupun pembahasan secara mendalam, karena analisis lebih lanjut akan dijelaskan pada subbab pembahasan.

a. Stakeholder Analysis

Pelaksanaan Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran, fungsi, serta tingkat keterlibatan yang berbeda dalam mendukung pelaksanaan program. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dilakukan oleh satu institusi, melainkan terbentuk melalui hubungan antarorganisasi yang saling mendukung sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Aktor yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis terdiri atas beberapa OPD hingga tim pelaksana yang memiliki kaitan langsung untuk keberlangsungan dari berjalannya program ini. Melihat dari susunan paling tinggi dari aktor yang terlibat dimulai oleh DPRD Kabupaten Bangkalan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, SPPG, dan penerima manfaat mulai dari sekolah

Gambar 4.2 Struktur Hubungan Aktor Kebijakan Makan Bergizi Gratis



Sumber : Data internal Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, 2025

b. Actor Stakeholder Analysis

1. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kodim/0829

52 Dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan aktor 44 aksana yang memiliki peran strategis dalam memastikan program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

35 SPPG memiliki kewenangan operasional dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di tingkat lapangan. Kewenangan tersebut meliputi perencanaan kebutuhan makanan berdasarkan jumlah penerima manfaat, pengelolaan proses pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan sesuai standar gizi yang telah ditetapkan, pemorsian makanan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat. Selain itu, SPPG juga berwenang melakukan pengawasan terhadap kualitas makanan, kebersihan proses produksi, serta ketepatan jumlah porsi yang disalurkan kepada sekolah sasaran. 143 am pelaksanaannya, SPPG bekerja berdasarkan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN)

dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta satuan pendidikan.

42 Dalam menjalankan tugasnya, SPPG didukung oleh berbagai sumber daya yang mencakup sumber daya manusia yang didapat melalui adanya pembukaan lowongan pekerjaan yang disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan (biasanya akan mendahulukan sumber daya manusia yang berasal dari radius wilayah terdekat), sarana-prasarana, dan dukungan anggaran. Sumber daya manusia terdiri dari kepala SPPG, ahli gizi, tenaga administrasi, juru masak, petugas pemorsian, petugas kebersihan, dan petugas distribusi. Dari sisi sarana-prasarana, SPPG memiliki dapur produksi, peralatan memasak, ruang penyimpanan bahan makanan, wadah distribusi makanan, serta kendaraan operasional untuk mendukung proses penyaluran makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Selain itu, sumber daya finansial berasal dari pendanaan program yang dialokasikan pemerintah untuk mendukung keberlangsungan operasional MBG.

Kontribusi utama SPPG dalam Program Makan Bergizi Gratis adalah memastikan makanan bergizi dapat diterima oleh sasaran secara tepat jumlah, tepat waktu, dan sesuai standar mutu yang ditetapkan. SPPG berperan langsung dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi layanan nyata yang dirasakan oleh peserta didik sebagai penerima manfaat.

Tabel 4.3 Data jumlah SPPG di setiap Kecamatan di Kabupaten Bangkalan

Kecamatan	Jumlah SPPG	Daftar SPPG
Modung	5	1) Ponpes Al Anwar (Modung) 2) Modung Patereman – Yayasan Berkah Nusantara Peduli

Kecamatan	Jumlah SPPG	Daftar SPPG
		3) Modung Patereman 2 – Yayasan Ash Shafiyah 4) Modung Pangpajung – Yayasan Discovery Water Sustainability 5) Al Anwar 2 Patereman
Tanjung Bumi	4	1) Bumi Anyar – Al Munir Jaya Barokah 2) Bumi Anyar 2 – Sehat Luhur Mandiri 3) Banyusangkah – Al Munir Jaya Barokah 4) Bumi Anyar Kwanyar – Al Munir Jaya Barokah
Geger	1	1) Kombangan – Al Munir Jaya Barokah
Bangkalan Kota	3	1) Kodim 0829 2) Martajasah – Sehat Luhur Mandiri 3) Mlajah – Sehat Luhur Mandiri
Kokop	3	1) Tlokoh – Garda Rejowangi Bela Bangsa 2) Durjan – Yayasan Al Mu'in Birem 3) Katol Timur – Fela Mandiri Raya
Klampis	1	1) Kopol – Yayasan Al Ghozali Dua Penyantren
Konang	2	1) Cangkareman – Yayasan Ibnu Dahlan 2) Batokaban 2 – Fela Mandiri Raya
Labang	1	1) Pangpong – Garuda Jaya Abadi
Kamal	2	1) Gili Timur – Yayasan Laili Izzatul Faiqoh 2) Banyuajuh 3 – Garuda Jaya Abadi
Bumeh	1	1) Bumeh – Yayasan Laili Izzatul Faiqoh

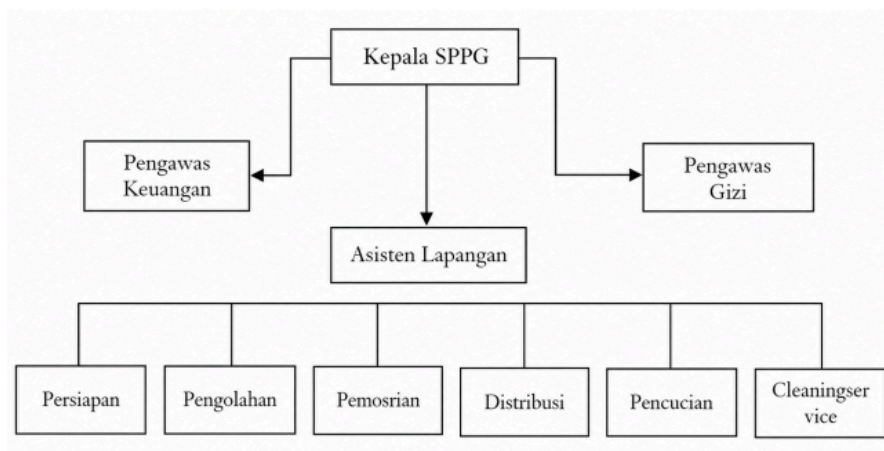
Kecamatan	Jumlah SPPG	Daftar SPPG
Sepulu	1	1) Lembung Paseser – YPI Al Azhar Indonesia
Kwanyar	2	1) Janteh 2 – Yayasan Laili Izzatul Faiqoh 2) Pesanggrahan – Yayasan Langkah Bersama Kita

Sumber : Data internal SPPG dalam Pembagian Unit SPPG Bangkalan

SPPG Kabupaten Bangkalan sejak 2025 akhir hingga saat ini yang masih aktif beroperasi hanya beberapa saja dikarenakan terdapat beberapa SPPG yang ditutup karena kurang memenuhi standar kebersihan dan kelayakan sebagai Dapur MBG. Salah satu SPPG yang masih aktif dan menjadi sampel penelitian ini adalah SPPG Kodim 0829 Kabupaten Bangkalan yang juga menjadi SPPG rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan karena sejak awal dimulainya program MBG di Kabupaten bangkalan, SPPG ini beserta keikutsertaan bagian dari Kodim 0829 memberikan dampak cukup besar untuk perjalanan program Makan Bergizi Gratis pada wilayah Bangkalan.

SPPG Kodim 0829 resmi menjadi Dapur MBG Bangkalan dengan pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja¹⁴⁷ di dalamnya ditetapkan sejak 10 Juni 2025 di Jakarta Selatan sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. SPPG ini juga mendapat sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga sebagai salah satu syarat utama pendirian Dapur MBG oleh Dinas Kesehatan sejak 30 Oktober 2025 oleh Dinas Kesehatan.

Tabel 4.4 Bagan Organisasi SPPG Kodim 0829 Kabupaten Bangkalan



Sumber : Data internal Bagan Organisasi SPPG Kodim 0829, 2026

Berikut merupakan penjelasan terkait hasil penjabaran tupoksi setiap Divisi di dalam SPPG Kodim 0829, antara lain :

1. Kepala SPPG

- Mengawasi seluruh kegiatan mulai dari penerimaan bahan baku sampai hasil produksi ke penerima manfaat
- Mengawasi Alur Pengadaan sampai penerimaan serta transaksi didalamnya
- Mengawasi dan evaluasi menu dari pengawas gizi

2. Pengawas Gizi

- Membuat siklus menu sesuai AKG dan kebutuhan penerima manfaat
- Mengawasi dan mengecek bahan baku yang datang sesuai standart yang dibutuhkan dapur
- Mengawasi bahan baku yang datang sampai packing sesuai dengan nilai gizi yang dibutuhkan
- Membuat Evaluasi harian dari sisa makanan penerima manfaat

- Koordinasi dengan koordinator pengolahan untuk membuat resep menu dan kebutuhan bahan baku

3. **Pengawas Keuangan**

- Membuat PO pemesanan dari bahan baku yang dibutuhkan oleh pengawas gizi
- Membuat rencanaa anggaran belanja
- Melakukan survey pasar
- Membuat dan mengawasi stock opname
- Mencatat semua pengeluaran didalam Dapur SPPG

4. **Asisten Lapangan**

- Menerima dan mengecek bahan baku sebelum diterima disesuaikan dengan PO yang dibuat
- Menata bahan baku di gudang kering maupun basah sesuai FIFO dan FEFO
- Berkoordinasi dengan eksternal terkait kebutuhan SPPG
- Ikut dalam pengantaran dan mengawasi pengantaran sampai pengambilan foodtray

5. **Divisi Persiapan**

135

- Ikut menerima dan mengecek bahan baku yang datang
- Menyiapkan bahan baku yang datang sebelum diolah meliputi, pencucian bahan baku, memotong bahan baku dan menghitung bahan baku

6. **Divisi Pengolahan**

Mengolah bahan baku yang telah disiapkan oleh bagian persiapan dengan standarisasi HACPP mulai dari suhu kematangan dan penanganan pangan setelah diolah

7. **Divisi Pemorsian**

Memorsikan makanan sesuai dengan AKG standarsasi kebutuhan gizi sesuai dengan jenis penerima manfaat.

8. Divisi Distribusi

Mengantar foodtray sampai ke penerima manfaat dengan aman dan pengambilan foodtray sesuai surat jalan yang dibawa oleh asisten lapangan

9. Divisi pencucian

- Membersihkan sisa makanan yang berada di foodtray dan mencuci foodtray dengan proses sterilisasi dengan menggunakan air panas
- Melakukan penimbangan sisa makanan sebagai evaluasi menu setiap hari

10. Cleaning Service

Memastikan semua ruangan bersih, higienis sesuai standar kebersihan yang telah ditetapkan oleh BGN.

Selain itu, keberadaan SPPG turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui keterlibatan tenaga kerja lokal dan penggunaan bahan pangan dari pemasok lokal. Dengan demikian, kontribusi SPPG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga mendukung penguatan ekonomi lokal dan keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis secara keseluruhan.

1.1 Sistem Pendistribusian oleh SPPG Kodim/0829

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan unit pelaksana yang bertugas melaksanakan layanan penyediaan dan distribusi makanan bergizi gratis kepada penerima manfaat. Selain mendistribusikan makanan, SPPG juga bertanggung jawab dalam memastikan keamanan pangan, kualitas gizi, serta pelaksanaan edukasi gizi kepada penerima manfaat.

Hasil observasi di Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa sistem distribusi MBG dilakukan selama 5 hari dari Senin-Jumat dimulai

sejak pukul 06.00 WIB, ketika enam armada distribusi SPPG berangkat menuju sekolah-sekolah penerima manfaat sesuai rute yang telah ditetapkan. Mekanisme ini sejalan dengan ketentuan BGN yang menegaskan bahwa SPPG bertanggung jawab terhadap proses penyediaan dan distribusi makanan kepada kelompok sasaran program.

39

Setelah makanan tiba di sekolah, pada pukul 07.00 WIB siswa melaksanakan kegiatan senam pagi atau aktivitas fisik bersama. Kegiatan ini mendukung implementasi Gerakan Sekolah Sehat yang mengintegrasikan aspek kesehatan fisik dan pemenuhan gizi peserta didik. Selanjutnya pada pukul 08.00 WIB, siswa mengonsumsi makanan bergizi yang telah didistribusikan sebagai sarapan pagi. Waktu pelaksanaan tersebut sesuai dengan definisi makan pagi dalam Juknis BGN, yaitu pemberian makanan pada rentang pukul 06.00–09.00 WIB dengan kontribusi energi sebesar 20–25% Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian penerima manfaat.

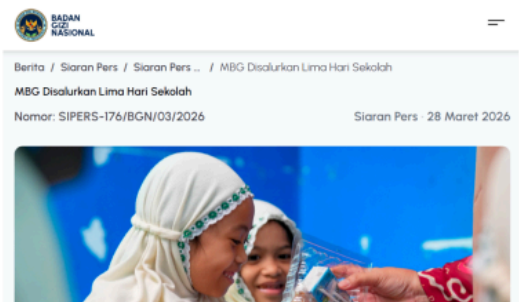
82

Gambar 4.3 Kutipan Petunjuk Teknis Tata Kelola dan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pemberian Makan Bergizi Gratis	: adalah program pemberian makan dengan menu lengkap serta memiliki kandungan gizi seimbang sesuai dengan anjuran kontribusi zat gizi terhadap kebutuhan gizi penerima manfaat sekali makan baik makan pagi atau makan siang.
Makan pagi	: adalah menu makanan yang diberikan pada rentang waktu pukul 06.00 s.d 09.00 kepada penerima manfaat yang memiliki kandungan gizi yang berkontribusi 20-25% Angka Kecukupan Gizi (AKG).
Makan siang	: adalah makanan yang diberikan pada rentang waktu pukul 11.00 s.d 14.00 kepada penerima manfaat yang memiliki kandungan gizi yang berkontribusi 30-35% AKG.

Sumber : Juknis BGN, 2025

Gambar 4.4 Unggahan PERS bernomor SIPERS-176/BGN/03/2026



Sumber : Siaran PERS Badan Gizi Nasional, 2026

76
Berdasarkan siaran pers Badan Gizi Nasional (BGN), penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik pada umumnya dilaksanakan selama lima hari sekolah dalam satu minggu. Namun, pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) serta wilayah dengan prevalensi stunting yang tinggi, di mana penyaluran MBG tetap dilakukan pada hari Sabtu untuk memastikan kebutuhan gizi anak terpenuhi secara berkelanjutan. Kebijakan ini didukung melalui pendataan yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan setempat, dengan mempertimbangkan jumlah sekolah, jumlah siswa, dan tingkat stunting sebagai dasar penentuan wilayah prioritas. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan status gizi peserta didik sekaligus mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia.

115
Berdasarkan hasil observasi, sistem distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Jadwal Pendistribusian dan Penerimaan MBG di Bangkalan

Waktu (WIB)	Kegiatan	Aktor Terlibat	Keterangan
05.30	Persiapan dan	SPPG,	Sebanyak 3

Waktu (WIB)	Kegiatan	Aktor Terlibat	Keterangan
	distribusi makanan dari SPPG ke sekolah	pengemudi distribusi, asisten lapangan	kendaraan distribusi berangkat menuju sekolah-sekolah penerima manfaat sesuai rute yang telah ditentukan. Makanan didistribusikan dalam ompreng berdasarkan jumlah penerima manfaat di masing-masing sekolah.
07.00	Senam pagi/aktivitas fisik siswa	Siswa dan Tenaga Pendidik	Seluruh siswa melaksanakan senam pagi sebagai bagian dari pembiasaan aktivitas fisik yang mendukung peningkatan kesehatan dan gizi peserta didik sesuai konsep Gerakan Sekolah Sehat (GSS).
07.30	Pembagian MBG	Siswa dan Tenaga Pendidik	Siswa mengambil dan mengonsumsi makanan bergizi yang telah didistribusikan oleh SPPG sebagai menu sarapan pagi di lingkungan sekolah.
07.30	Penandatanganan	Tenaga	Dilakukan

Waktu (WIB)	Kegiatan	Aktor Terlibat	Keterangan
	an Berita Acara Serah Terima	Pendidik tertunjuk dan Asisten Lapangan	penandatanganan dokumen serah terima sebagai bukti bahwa makanan telah diterima sesuai jumlah dan kondisi yang ditetapkan
11.00-12.00	Pengambilan Ompreng	SPPG	Kendaraan distribusi kembali ke sekolah untuk mengambil ompreng yang telah digunakan dan membawanya ke dapur SPPG untuk proses pencucian dan sanitasi.
Menyesuaikan jadwal buka posyandu	Distribusi MBG kepada kelompok Posyandu	Kader Posyandu, tenaga kesehatan, dan penerima manfaat 3B	Makanan atau paket gizi disalurkan kepada balita, ibu hamil, dan ibu menyusui berdasarkan data sasaran yang telah diverifikasi oleh Posyandu dan SPPG.

Sumber : Data internal SPPG Kodim/0829, 2026

Jadwal yang dibuat oleh sekolah dan Dapur MBG sebelumnya juga sudah tercantum pada MoU antara kedua belah pihak. Jadwal yang dibuat oleh pihak sekolah juga merupakan bentuk keikutsertaan pendorong peningkatan gizi selain Makan Bergizi Gratis. Hal tersebut didapatkan pada saat wawancara yang dilakukan dengan PIC Makan Bergizi Gratis SMP Negeri 1 Bangkalan adalah :

“Pagi itu kami selalu ada senam. Senam itu juga kami lakukan karena dulu sempat ada dorongan juga untuk melakukan GSS atau Gerakan Sekolah Sehat. Akhirnya kami ikut untuk melakukan senam seperti ini. Tidak hanya siswa, tapi guru-guru juga ikut senam seperti sekarang. Tapi, MBG itu kami dapat dari Senin sampai Jumat saja. Dulu kami dapat sampai Sabtu, setelah itu hanya sampai Jumat.”

Gambar 4.5 Kutipan Petunjuk Teknis Distribusi MBG

- **Hari Pendistribusian MBG:** Layanan pemberian makan kepada penerima manfaat adalah 6 (enam) hari dalam satu minggu (Senin sampai dengan Sabtu) dengan total akumulasi layanan sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) hari pada Tahun Anggaran 2026.
- **Pengaturan pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama** (selain hari Minggu) tetap terhitung sebagai Hari Pendistribusian MBG. Kegiatan produksi dan distribusi fisik pada hari tersebut ditiadakan, dan digantikan dengan mekanisme distribusi paket kemasan makanan kering (kemasan sehat dan tahan lama) pada hari sebelumnya (H-1).
- **Pengaturan pada Hari Minggu** (Aktivitas Persiapan): Hari Minggu ditetapkan bukan sebagai Hari Pendistribusian MBG dan bukan Hari Operasional SPPG, namun SPPG diwajibkan melaksanakan aktivitas persiapan berupa penerimaan bahan baku (*receiving*) dan pemeriksaan kualitas (*quality control*) guna persiapan produksi hari Senin. Kepala SPPG, Pengawas, Jurutama Masak, dan Relawan yang dijadwalkan hadir untuk tugas tersebut berhak mendapatkan insentif harian sesuai bukti kehadiran.

Sumber : Juknis BGN, 2025

Dari gambar 4.5 dapat dilihat bahwa petunjuk teknis menyatakan bahwa distribusi dilakukan 6 hari dalam 1 minggu kecuali Minggu. Pada hari libur nasional maupun cuti bersama dilakukan penghitungan hari pendistribusian MBG dengan pergantian distribusi paket kemasan makanan kering.

Adapun pada setiap pendistribusian telah disebutkan bahwa terdapat proses penandatanganan Berita Acara Serah Terima MBG ke Pihak Sekolah yang diserahkan oleh asisten lapangan kepada Tenaga Pendidik yang ditugaskan. Hal tersebut diperkuat oleh observasi pada

rute pembagian MBG oleh SPPG dan hasil wawancara oleh PIC MBG, yaitu :

“Setiap anak-anak sudah mendapatkan makanan oleh setiap perwakilan kelas, Pak Sukri menyerahkan dokumen ini. Saya nanti tanda tangan disini, lalu dikembalikan ke beliau.”

Gambar 4.6 Format Berita Acara Serah Terima SPPG dengan Sekolah Penerima



BERITA ACARA SERAH TERIMA
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
No: / BAST / SPPGKODIM / VIII / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

PIHAK PERTAMA
Penanggung Jawab :
Unit : SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI KODIM/0829
BANGKALAN

PIHAK KEDUA
Nama Sekolah :
Nama Penerima :

Pada hari ini Tanggal Bulan 2025 PIHAK KEDUA telah menerima Paket Makanan Bergizi Gratis dari PIHAK PERTAMA, yang didistribusikan melalui PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan akan dikembalikan dalam keadaan baik oleh PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA, setelah dikonsumsi siswa. Dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	WAKTU PENYERAHAN (PAGI/SIANG)
1	PAKET PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS		

Demikian Berita Acara Serah Terima ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Sumber : Data internal SPPG Kodim/0829

Untuk berjalannya pendistribusian MBG, SPPG juga melakukan pengadaan bahan baku melalui sistem Pre-Order (PO) melalui supplier yang merupakan UMKM yang terdapat di wilayah Bangkalan baik Bangkalan Pusat maupun wilayah Bangkalan yang dapat dicakup sebagai pemasok bahan makanan dengan kualitas yang sesuai dengan standar BGN. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Kepala SPPG terkait pasokan bahan, yaitu :

“Kami melaksanakan pengadaan bahan baku melalui sistem PO kepada supplier dari UMKM, lalu pembayaran dilakukan dengan e-purchase melalui VA atau dibayar langsung secara tunai. Untuk distribusi sendiri, relawan SPPG yang mengambil bagian mulai dari pengantaran sampai pengambilan kembali setelah diterima oleh penerima manfaat.”

Gambar 4.7 Juknis Ketentuan Supplier Distributor Bahan Baku MBG

4.9.3. Belanja Bahan

Belanja bahan berdasarkan daftar menu yang telah disusun dan diajukan melalui proposal.

- a. Perwakilan Yayasan (Penerima Bantuan) melaksanakan belanja bahan dengan dikoordinasikan dan dilaksanakan dengan sepengetahuan Kepala SPPG.
- b. Belanja bahan wajib diprioritaskan melalui BUM Desa, Koperasi, UMKM, atau usaha mikro lokal. Supplier distributor hanya dapat digunakan apabila kebutuhan bahan baku tidak dapat dipenuhi oleh entitas ekonomi lokal tersebut, dengan tetap memastikan harga ekonomis dan kualitas bahan yang baik.
- c. Bahan pangan asal hewan (daging, telur dan susu) yang digunakan dalam menu MBG berasal dari Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU)/Unit Usaha Produk Hewan yang memiliki sertifikatifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

Sumber : Juknis BGN, 2025

Selain itu, SPPG juga bertanggung jawab atas pengawasan saat pendistribusian dan penerimaan MBG ke sekolah terdampak. Untuk asisten lapangan juga rutin melakukan penandatanganan serah terima MBG yang didapatkan oleh sekolah terkait seperti observasi yang dilakukan peneliti langsung bersama asisten lapangan dalam menjalankan tugas tersebut setiap hari. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Kepala SPPG sebagai berikut :

“Pengawasan kami bagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Pengawasan dari internal yaitu pengawasan gizi, keuangan, hubungan eksternal yang dilakukan oleh Kepala SPPG, AK atau Asisten keuangan, AG atau Ahli Gizi, Aslap atau Asisten Lapangan, Korwil, KPPG, sampai BGN Pusat.

Nah, untuk pengawasan eksternal sendiri dilakukan oleh satgas dan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan.”

Mekanisme kerjasama antara dua bagian dalam Stakeholder Primer juga terdapat pada MoU dengan pihak sekolah dalam jangka waktu sesuai dan dengan SK yang telah disepakati bersama. Informasi tersebut disampaikan oleh Rizkia selaku Kepala SPPG yang menyebutkan :

“Untuk mekanisme sendiri kami sebagai SPPG memiliki MoU dengan pihak sekolah terkait. Untuk MoU sendiri kami laksanakan dengan jangka waktu sesuai SK berlaku yang sebelumnya sudah sempat disepakati oleh kedua belah pihak.”

1.2 Anggaran

³⁸ Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, pendanaan utama Program MBG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa pendanaan pelaksanaan Program MBG berasal dari APBN.

Selain itu, untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penyediaan sarana-prasarana pendukung, pendanaan dapat berasal dari APBN, APBD, maupun pendanaan lain hasil kerja sama Badan Gizi Nasional (BGN) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2). Sementara itu, dukungan pelaksanaan program di daerah juga dapat didanai melalui APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat (1).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola SPPG dan pelaksana program di Kabupaten Bangkalan, salah satu permasalahan yang ditemukan dalam aspek anggaran adalah keterlambatan pencairan dana operasional pada masa awal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi tersebut menyebabkan pihak penyelenggara

harus terlebih dahulu menggunakan mekanisme hutang atau talangan kepada pemasok bahan pangan untuk memastikan proses produksi dan distribusi makanan tetap berjalan sesuai jadwal. Dengan kata lain, meskipun sumber pendanaan program telah dijamin melalui APBN, terdapat jeda waktu antara pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran yang mengakibatkan kebutuhan modal operasional sementara harus ditanggung oleh pihak pelaksana maupun mitra penyedia bahan baku. Hasil wawancara yang dilakukan oleh Kepala SPPG Kodim/0829 adalah sebagai berikut :

“Hambatan biaya hanya terjadi di awal sewaktu program baru berjalan, karena anggaran telat cair, jadi kita sebagai penanggung jawab akhirnya harus hutang terlebih dahulu ke supplier. Serta untuk koordinasi program adanya hambatan juga sewaktu memulai yang lumayan dipersulit untuk koordinasi dengan dinas terkait karena program baru yang belum familiar juga dikalangan pemerintah daerah, sehingga kendala dilapangan kadang lambat tertangani. Untuk saat ini koordinasi sudah mulai baik dan terbentuk dengan adanya pembentukan tim Satgas oleh pemda diharapkan kedepannya akan menunjukkan koordinasi yang solid antar lintas lembaga terkait adanya program MBG ini ”

Berdasarkan keterangan informan, mekanisme hutang tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keberlangsungan layanan kepada penerima manfaat sehingga distribusi makanan bergizi kepada siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui tidak mengalami gangguan. Namun demikian, kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko terhadap kelancaran operasional program apabila keterlambatan pencairan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Selain memengaruhi arus kas pelaksana program, keterlambatan pembayaran juga dapat berdampak pada hubungan kerja sama dengan pemasok bahan pangan yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok MBG.

Temuan ini menunjukkan bahwa aspek pendanaan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran dalam dokumen kebijakan,

tetapi juga menyangkut ketepatan waktu pencairan¹² dan mekanisme pengelolaan keuangan di tingkat implementasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem⁴⁸ pencairan anggaran yang lebih tepat waktu dan berkelanjutan agar pelaksanaan Program MBG dapat berjalan secara optimal tanpa membebani pelaksana program dengan kebutuhan pendanaan talangan di awal kegiatan.

Anggaran sudah dianggap membaik saat ini dengan adanya pelaporan antar pihak SPPG yang berwenang dengan Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan walaupun intensitasnya masih cukup jarang dilakukan kecuali jika terdapat masalah serius atau kasus yang membahayakan penerima manfaat MBG. Rencana anggaran dilakukan setelah adanya diskusi antara SPPG dengan Nutrititions di Dinas Kesehatan terkait menu yang akan diberikan ke penerima manfaat dalam periode 1 bulan. Hal tersebut yang menjadi acuan untuk dasar pembuatan rancangan anggaran yang nantinya juga akan dimonitor dan evaluasi oleh DPR Kabupaten Bangkalan Komisi D. Untuk memperkaya informasi, peneliti juga menggali terkait kendala koordinasi yang dilakukan oleh setiap stakeholder selama berjalannya program MBG di wilayah cakupan SPPG Kodim 0829. Dari proses wawancara tersebut didapatkan hasil :

“Untuk koordinasi program ada juga hambatannya sewaktu memulai program, kami cukup dipersulit untuk koordinasi dengan dinas terkait karena program baru yang belum familiar juga dikalangan pemerintah daerah, sehingga kendala di lapangan kadang lambat untuk ditangani. Untuk saat ini koordinasi sudah mulai membaik dan sudah dibentuk dengan adanya pembentukan tim SATGAS oleh Pemerintah Daerah. kami berharap kedepannya akan menunjukkan koordinasi yang solid antar lintas lembaga terkait agar menyukseskan program MBG terutama terkait uang dan anggaran.”

Gambar 4.8 Rencana Anggaran Bahan Makanan SPPG Kodim/0829

RENCANA ANGGARAN BAHAN MAKANAN					
Pengiriman : Senin, 1 Juni 2026 (Pukul 14.00)					
No	Uraian Jenis Bahan Makanan	Banyaknya (Angka)	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Beras (1 karung = 25 kg)	22	karung	RP376.000	RP8.272.000
2	Gula pasir	12	kg	RP16.500	RP198.000
3	Minyak goreng	15	dus	RP216.000	RP3.240.000
4	Kaldu Jamur Totole 1 kg	4	pcs	RP130.000	RP520.000
5	Ladaku	1	pack	RP66.000	RP66.000
6	Garam	1	dus	RP80.000	RP80.000
7	Baking powder koepo-koepo	24	pcs	RP8.500	RP204.000
8	Tepung terigu segitiga biru	50	kg	RP12.500	RP625.000
9	Tepung Tapioka	25	kg	RP13.500	RP337.500
10	Mayonaise Maestro	10	pcs	RP23.500	RP235.000
11	Saos Tomat Delmonte 1 kg	12	pcs	RP18.000	RP216.000
12	Saos Sambal Delmonte	10	pcs	RP23.500	RP235.000
13	Saori Saos Tiram	6	botol	RP60.000	RP360.000
14	Kecap Bango	8	pcs	RP27.000	RP216.000
15	Kunyit bubuk desaku	2	pack	RP23.000	RP46.000
16	Ketumbar bubuk desaku	2	pack	RP23.000	RP46.000
17	Jahe bubuk desake	2	renteng	RP11.000	RP22.000
18	Mentega Blue Band	2	kg	RP45.000	RP90.000
19	Tepung maizenaku	5	kg	RP30.000	RP150.000
20	Tepung panir	20	kg	RP19.000	RP380.000
21	Dau Jeruk	1,5	kg	RP35.000	RP52.500
22	Laos	1	kg	RP14.000	RP14.000
23	Jeruk Nipis	1	kg	RP30.000	RP30.000
24	Kemiri	1	kg	RP50.000	RP50.000
25	Telur Ayam	15	kg	RP25.000	RP375.000
26	Saos Lada Hitam Delmonte 250gr	48	pcs	RP13.000	RP624.000
27	Daging Ayam Fillet	143	kg	RP46.000	RP6.578.000
28	Tahu	875	pcs	RP1.200	RP1.050.000
29	Wortel	30	kg	RP16.000	RP480.000
30	Kubis	30	kg	RP9.000	RP270.000
31	Kubis Ungu	20	kg	RP30.000	RP600.000
32	Jeruk Lokal (1 kg = 12)	200	kg	RP16.000	RP3.200.000
33	Bawang putih	6	kg	RP39.000	RP234.000
34	Susu Ultra Milk UHT Fullcream 125 ml	17	dus	RP133.000	RP2.261.000
					31.357.000

Sumber : Data internal finance SPPG Kodim/0829, Juni 2026

2. Penerima Manfaat MBG

20

Penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan merupakan kelompok sasaran yang secara

langsung menerima intervensi pemenuhan gizi dari pemerintah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebagai penerima manfaat, kelompok ini tidak memiliki kewenangan dalam proses perumusan maupun pengambilan keputusan kebijakan MBG. Namun, mereka memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi karena menjadi pihak yang merasakan secara langsung dampak dari pelaksanaan program. Dalam analisis stakeholder, kelompok penerima manfaat umumnya dikategorikan sebagai *subjects*, yaitu aktor yang memiliki kepentingan tinggi terhadap keberhasilan program tetapi memiliki pengaruh yang relatif rendah terhadap proses pengambilan keputusan.

Sumber daya utama yang dimiliki penerima manfaat berupa partisipasi dalam pelaksanaan program, data kesehatan dan status gizi, data kehadiran sekolah, serta umpan balik terhadap kualitas layanan yang diberikan. Data tersebut menjadi sumber informasi penting bagi pemerintah dan pelaksana program untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

Kontribusi penerima manfaat sangat penting dalam menentukan keberhasilan Program MBG. Melalui keterlibatan aktif dalam mengonsumsi makanan bergizi yang disediakan dan mengikuti kegiatan pemantauan kesehatan, kelompok sasaran membantu pemerintah mencapai tujuan program, yaitu meningkatkan status gizi masyarakat, mendukung tumbuh kembang anak, meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik, serta mempercepat upaya pencegahan dan penurunan stunting..

a. Siswa dan Tenaga Pendidik Sekolah

Berdasarkan pada Gambar 4.6, kelompok penerima manfaat terbesar dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan adalah siswa dan tenaga pendidik sekolah dengan total 2.088 penerima manfaat. Kelompok ini terdiri atas siswa TK Kartika, SDN Kraton 1–5, SMPN 1 Bangkalan, serta tenaga pendidik yang menerima porsi makanan sesuai ketentuan program. Sebagai penerima manfaat langsung, siswa dan tenaga pendidik tidak memiliki kewenangan dalam proses perumusan maupun pengambilan keputusan kebijakan MBG.

Namun, mereka memiliki kepentingan yang sangat tinggi terhadap keberlangsungan program karena manfaat yang diterima berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan gizi dan peningkatan kualitas pembelajaran.

Sumber daya yang dimiliki kelompok ini berupa partisipasi aktif dalam pelaksanaan program, data kehadiran, serta umpan balik terkait kualitas dan penerimaan makanan yang disediakan. Selain itu, tenaga pendidik berperan dalam mendampingi, mengawasi, dan memastikan distribusi makanan berlangsung tertib di lingkungan sekolah. Kontribusi utama kelompok ini adalah mendukung pencapaian tujuan MBG melalui peningkatan status gizi peserta didik, peningkatan konsentrasi belajar, serta pembentukan kebiasaan konsumsi makanan bergizi. Tingkat penerimaan dan keterlibatan siswa maupun guru juga menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program.

Selain SPPG, sekolah juga memiliki peran cukup penting terhadap berjalannya program MBG sebagai penerima manfaat langsung. SPPG Kodim 0829 mendistribusikan kepada beberapa sekolah antara lain SDN Kraton 1, SMPN 1 Bangkalan. Terkait penerimaan manfaat dari pelaksanaan yang dilakukan oleh SPPG Kodim 0829 dengan tupoksi distribusi, penjaminan standar mutu, keamanan pangan, serta pemenuhan kebutuhan gizi, hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Sekolah SDN Kraton 1, Ibu Erna :

“Sejauh ini 144muanya lancar, bahkan kami selalu mendapatkan makanan yang baik dan bergizi untuk anak-anak dan tenaga pendidik. Karena SPPG Kodim sangat bagus. Sayur ada, buah ada, susu, nasi, dan lauknya dimasak cocok untuk anak-anak kecil dan orang dewasa.”

Untuk memperkuat informasi serupa, penerima manfaat lainnya yaitu SMP Negeri 1 Bangkalan juga menyampaikan hal yang sama meliputi :

“MBG yang kami terima selalu bagus, anak-anak selalu suka dan kadang mereka juga membawa pulang beberapa makanan yang bisa dibawa pulang seperti susu atau buah yang mereka

dapat. Memang untuk menu dan gizi sendiri, SPPG Kodim sangat baik pemenuhannya kepada kami.”

Sebagai bahan tambahan sebagai hasil dari berjalannya MBG di sekolah penerima manfaat, peneliti juga menghimpun jawaban dari siswa penerima MBG terkait hasil program yang mereka rasakan selama mereka mendapatkan MBG sejak November, 2025. Hasil wawancara yang didapat oleh siswa penerima Kirana (siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Bangkalan) sebagai berikut :

“MBG-nya selalu enak. Kami satu kelas tidak menyisakan MBG, karena pagi kami harus senam terlebih dahulu karena kan ada program pemerintah lalu kami sarapan dari MBG.”

b. Posyandu (Balita, Bumil, Busui)

Kelompok Posyandu merupakan salah satu sasaran utama Program Makanan ⁴⁴149rgizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan yang mencakup ¹⁴⁹balita, ibu hamil (bumil), dan ibu menyusui (busui). Berdasarkan data SPPG Khusus Kabupaten Bangkalan bulan Juni, jumlah penerima manfaat dari kelompok Posyandu mencapai 257 orang, yang terdiri atas 196 balita, 20 ibu hamil, dan 61 ibu menyusui yang tersebar di beberapa Posyandu wilayah ⁵⁷Bangkalan. Kelompok ini menjadi target penting dalam program karena berada pada fase kehidupan yang sangat menentukan kualitas kesehatan dan status gizi masyarakat di masa mendatang.

Sumber daya yang dimiliki kelompok Posyandu berupa data kesehatan, data status gizi, serta data pertumbuhan dan perkembangan yang dihimpun secara berkala melalui kegiatan Posyandu dan fasilitas kesehatan. Data tersebut menjadi dasar dalam penentuan sasaran, pemantauan pelaksanaan program, serta evaluasi efektivitas intervensi yang diberikan. Selain itu, partisipasi aktif ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga balita dalam kegiatan Posyandu turut mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Kontribusi kelompok Posyandu terhadap Program MBG terdapat dari perannya sebagai indikator utama keberhasilan program dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Di sisi lain, pemenuhan gizi balita menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan stunting, peningkatan pertumbuhan, dan perkembangan anak. Oleh karena itu, kelompok Posyandu memiliki posisi strategis dalam mendukung tercapainya tujuan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bangkalan.

Gambar 4.9 Daftar Penerima Manfaat SPPG Khusus Kabupaten Bangkalan

a.

DAFTAR PENERIMA MANFAAT SPPG KHUSUS KABUPATEN BANGKALAN		
Yayasan Asra Bakti Maritim		
Bulan : Juni		
No	DAFTAR NAMA LEMBAGA PENERIMA	JUMLAH
SEKOLAH		
1	TK KARTIKA	122
	GURU (PORSI BESAR)	10
	SD KRATON 1 (PORSI KECIL)	96
2	SD KRATON 1 (PORSI BESAR)	88
	GURU (PORSI BESAR)	19
	SD KRATON 2 (PORSI KECIL)	203
3	SD KRATON 2 (PORSI BESAR)	209
	GURU (PORSI BESAR)	24
	SD KRATON 3 (PORSI KECIL)	173
4	SD KRATON 3 (PORSI BESAR)	182
	GURU (PORSI BESAR)	22
	SD KRATON 5 (PORSI KECIL)	100
5	SD KRATON 5 (PORSI BESAR)	103
	GURU (PORSI BESAR)	16
	SMPN 1 BANGKALAN	646
5	GURU (PORSI BESAR)	75
	SUB TOTAL PORSI KECIL	694
SUB TOTAL PORSI BESAR		1394
TOTAL		2088

b.

POSYANDU		
1	BALITA POSYANDU NUSA INDAH (>12 BULAN)	50
	IBU HAMIL POSYANDU NUSA INDAH	5
	IBU MENYUSUI POSYANDU NUSA INDAH	13
2	BALITA POSYANDU SALAK 1 (>12 BULAN)	61
	IBU HAMIL POSYANDU SALAK 1	1
	IBU MENYUSUI POSYANDU SALAK 1	7
3	BALITA POSYANDU SALAK 2 (>12 BULAN)	42
	IBU HAMIL POSYANDU SALAK 2	2
	IBU MENYUSUI POSYANDU SALAK 2	11
4	BALITA POSYANDU PUSTU KRATON (>12 BULAN)	26
	IBU HAMIL POSYANDU PUSTU KRATON	3
	IBU MENYUSUI POSYANDU PUSTU KRATON	12
5	BALITA POSYANDU KEMUNING (>12 BULAN)	17
	IBU HAMIL POSYANDU KEMUNING	2
	IBU MENYUSUI POSYANDU KEMUNING	5
SUB TOTAL BALITA		196
SUB TOTAL IBU HAMIL & IBU MENYUSUI		61
TOTAL		257
TOTAL KESELURUHAN		2345

Sumber : Data internal SPPG Kodim/0829 Kabupaten Bangkalan

3. OPD (Dinas Kesehatan & Dinas Pendidikan)

- Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya yang berkaitan dengan aspek kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Dinas Kesehatan berperan dalam melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Puskesmas, serta Posyandu untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan standar kesehatan dan gizi yang telah ditetapkan.

Kewenangan Dinas Kesehatan dalam program ini meliputi pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan, penyediaan data sasaran kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta pemantauan kondisi kesehatan penerima manfaat. Selain itu, Dinas Kesehatan juga berperan dalam mendukung kegiatan edukasi gizi dan pemantauan status gizi penerima manfaat melalui jejaring Puskesmas dan Posyandu yang tersebar di Kabupaten Bangkalan.

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan berupa tenaga kesehatan, nutrisionis, kader Posyandu, data kesehatan masyarakat, serta fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung implementasi program. Melalui sumber daya tersebut, Dinas Kesehatan berkontribusi dalam proses verifikasi data penerima manfaat, pemantauan dampak program terhadap status gizi masyarakat, serta penguatan edukasi mengenai pola konsumsi makanan bergizi.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Kesehatan memiliki tingkat kepentingan yang tinggi terhadap keberhasilan Program MBG karena program ini berkaitan langsung dengan upaya penurunan stunting, peningkatan status gizi masyarakat, dan pencapaian indikator kesehatan daerah. Namun demikian, pengaruh Dinas Kesehatan dalam pengambilan keputusan program relatif terbatas

karena sebagian besar kewenangan strategis dan pendanaan berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional.

Gambar 4.10 Keikutsertaan Dinas Kesehatan Tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota

5.2.2. Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tim Provinsi/Kabupaten/Kota adalah tim Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) yang penanggung jawabnya adalah kepala KPPG. Kepala KPPG bertugas melakukan koordinasi dengan dinas teknis terkait program MBG seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Kantor Departemen Agama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan OPD lainnya.

Sumber : Juknis BGN, 2025

- Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan merupakan OPD yang berperan sebagai penghubung antara pelaksana Program MBG dengan satuan pendidikan yang menjadi lokasi penerima manfaat. Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Pendidikan terlibat dalam proses koordinasi pelaksanaan program di sekolah, pendataan sasaran penerima manfaat, serta fasilitasi komunikasi antara sekolah dan pihak SPPG.

Kewenangan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan MBG mencakup pembinaan dan pengelolaan satuan pendidikan daerah, penyediaan data peserta didik, serta koordinasi dengan kepala sekolah terkait pelaksanaan distribusi makanan bergizi. Selain itu, Dinas Pendidikan juga berperan dalam memastikan bahwa kegiatan MBG dapat terintegrasi dengan aktivitas sekolah tanpa mengganggu proses pembelajaran.

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan meliputi jaringan sekolah, data peserta didik, tenaga pendidik, kepala sekolah, serta perangkat administrasi pendidikan yang mendukung pelaksanaan

program. Melalui sumber daya tersebut, Dinas Pendidikan memberikan kontribusi dalam memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat, kelancaran distribusi makanan di sekolah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi program di lingkungan pendidikan.

138

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan memiliki kepentingan yang tinggi terhadap keberhasilan MBG karena program ini berhubungan dengan peningkatan kesehatan, konsentrasi belajar, dan kualitas peserta didik. Selain itu, keberhasilan program juga dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan melalui peningkatan kesiapan belajar siswa. Meskipun demikian, sebagaimana Dinas Kesehatan, peran Dinas Pendidikan lebih banyak berada pada aspek koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program, sedangkan kebijakan strategis dan penganggaran utama berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional.

4. DPRD Komisi D

DPRD⁹¹ Kabupaten Bangkalan merupakan stakeholder yang berperan dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, DPRD tidak terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, penyediaan anggaran, produksi makanan, maupun distribusi makanan kepada penerima manfaat. Kewenangan utama DPRD berada pada fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik di daerah serta penyampaian masukan kepada pemerintah daerah terkait berbagai permasalahan yang ditemukan selama implementasi program.

Gambar 4.11 Publikasi Peran DPRD Kabupaten Bangkalan Terkait Patologi MBG



Sumber : Website resmi <https://dprd.bangkalankab.go.id/>

Sumber daya yang dimiliki DPRD meliputi kewenangan politik, hasil pengawasan lapangan, jaringan komunikasi dengan pemerintah daerah, serta informasi yang diperoleh melalui kegiatan reses dan interaksi dengan masyarakat. Melalui sumber daya tersebut, DPRD dapat mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan MBG dan menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk perbaikan program.

Kontribusi DPRD dalam Program MBG diwujudkan melalui pengawasan pelaksanaan program di lapangan, penyampaian aspirasi masyarakat, serta dukungan terhadap koordinasi antarinstitusi yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Namun, karena tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengambilan keputusan operasional maupun pengelolaan program, pengaruh DPRD terhadap implementasi MBG bersifat tidak langsung.

70

1. Variabel Stakeholder Utama (Primer)

Stakeholder utama (primer) merupakan pihak yang memiliki keterlibatan secara langsung dalam pelaksanaan program, menerima dampak secara langsung, atau menjalankan fungsi operasional dalam implementasi kebijakan. Pada penelitian ini, stakeholder primer terdiri atas pihak yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di tingkat layanan dan penerima manfaat.

Dalam pendekatan Stakeholder Analysis, pihak yang memiliki keterlibatan langsung terhadap pelaksanaan program serta menerima dampak paling besar dari keberlangsungan kebijakan dikategorikan sebagai stakeholder utama (primer). Stakeholder primer memiliki posisi yang penting karena berperan sebagai pelaksana utama yang menjalankan proses implementasi secara operasional dan memastikan tujuan program dapat diterjemahkan menjadi hasil yang dapat diterima oleh kelompok sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, stakeholder utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bangkalan adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kodim 0829, SDN Kraton 1 dan SMPN 1 Bangkalan.

Posisi SPPG dalam pelaksanaan program menunjukkan keterlibatan cara langsung dalam rangkaian kegiatan utama kebijakan, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi makanan, distribusi kepada penerima manfaat, hingga pengawasan mutu dan keamanan pangan selama proses pelaksanaan berlangsung. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Rizkia Nur Febianti selaku Kepala SPPG Kodim 0829 Kabupaten Bangkalan :

“Peran SPPG itu sebenarnya ada di produksi sama distribusi makanan. Jadi kami memastikan makanan yang disiapkan itu kualitasnya baik dan aman dikonsumsi. Mulai dari bahan baku sampai proses distribusi tetap ada pengawasannya.”

Keterlibatan SPPG tidak hanya menunjukkan fungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga menggambarkan perannya sebagai penghubung antara tujuan kebijakan di tingkat nasional dengan pelaksanaan program pada tingkat daerah. Melalui pelaksanaan fungsi operasional tersebut, SPPG menjadi pihak yang berinteraksi secara langsung dengan berbagai stakeholder lain seperti satuan pendidikan, pemasok bahan baku, relawan distribusi, serta instansi yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Hal tersebut diperkuat dengan kutipan wawancara oleh Kepala SPPG :

“Terus program ini juga tidak hanya soal makanan bergizi, tapi kami juga melibatkan UMKM lokal untuk jadi pemasok

bahan baku dapur. Jadi harapannya program ini bisa jalan sekaligus memberi manfaat ke ekonomi masyarakat sekitar.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari SPPG Kodim 0829, pelaksanaan peran tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan sistem kerja yang mencakup proses produksi dan distribusi makanan dengan tetap menjamin standar mutu, keamanan pangan, serta pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat. Selain itu, pelaksanaan program juga melibatkan dukungan dari pelaku ekonomi lokal melalui kerja sama penyediaan bahan baku yang mendukung operasional dapur SPPG

Untuk memperkaya informasi, peneliti juga menggali terkait kendala koordinasi yang dilakukan oleh setiap stakeholder selama berjalannya program MBG di wilayah cakupan SPPG Kodim 0829. Dari proses wawancara tersebut didapatkan hasil :

“Untuk koordinasi program ada juga hambatannya sewaktu memulai program, kami cukup dipersulit untuk koordinasi dengan dinas terkait karena program baru yang belum familiar juga dikalangan pemerintah daerah, sehingga kendala di lapangan kadang lambat untuk ditangani. Untuk saat ini koordinasi sudah mulai membaik dan sudah dibentuk dengan adanya pembentukan tim SATGAS oleh Pemerintah Daerah. kami berharap kedepannya akan menunjukkan koordinasi yang solid antar lintas lembaga terkait agar menyukseskan program MBG.”

Namun, bagi para penerima manfaat MBG, mereka memang tidak pernah menemui adanya hambatan logistik maupun administrasi terkait program ini. Hal tersebut juga dinyatakan oleh masing-masing perwakilan sekolah penerima manfaat MBG sebagai sampel, yaitu wawancara yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SDN Kraton 1 dan PIC MBG di SMPN 1 Bangkalan adalah sebagai berikut :

“Untuk kendala alhamdulillah sejauh ini tidak ada. Hanya saja mungkin dulu pernah terjadi buah yang diberikan itu

menurut saya kurang sesuai dengan standarnya. Karena terlalu kecil. Entah apa alasan SPPG, namun kami juga sebagai pihak sekolah sempat mendapatkan kritik dari wali murid. Entah buahnya kecil atau buahnya asam. Namun, kami langsung sampaikan ke pihak SPPG yang berkeliling meminta tanda tangan seperti Bapak Sukri ini.”

Peneliti juga memvalidasi keterangan hambatan terkait menu yang disajikan kepada siswa penerima salah satunya merupakan siswa kelas 8, Dhani yang membenarkan adanya beberapa kendala yang sempat terjadi dalam proses pendistribusian dan penerimaan MBG di sekolahnya. Hasil wawancara yang didapat adalah :

“Sempat ada kekurangan. Awal-awal dulu sempat ada ulat kecilnya di buah anggur yang di ompreng. Jadi, beberapa dari kami membuang buahnya dan tidak mendapatkan ganti. Selain itu makanan yang diberikan enak dan kami tahu kadar gizinya juga.”

Selain hambatan yang dialami, penerima manfaat juga menyebutkan bahwa terdapat perubahan cukup signifikan terhadap adanya program MBG bagi perekonomian dan kesehatan dari peserta didik penerima manfaat. Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan PIC MBG di SMP Negeri 1 Bangkalan yang menyatakan bahwa :

“Anak-anak bisa menabung uang saku yang didapatkan dari orang tuanya. Karena pagi mereka juga sudah mendapat makanan dari pemerintah. Untuk motivasi belajar dan datang ke sekolah juga menjadi meningkat. Karena mereka saya rasa mendapatkan gizi yang cukup baik dibandingkan sebelum adanya MBG. Sebelumnya anak-anak kadang sarapan saja jika mampu dan sempat. Bahkan sekolah kami sempat membuat film pendek terkait salah seorang siswa yang sebelumnya tidak bisa membeli sepatu hingga sepatunya sangat tidak layak, namun dengan adanya MBG dia bisa menabung uang saku dan membeli sepatu yang lebih layak

untuk digunakan. Kasihan sebelumnya, tapi sekarang kami pihak sekolah juga cukup lega karena selain dia bisa nabung, dia juga mendapat asupan gizi yang sesuai dan seharusnya.”

Peneliti juga memverifikasi jawaban tersebut kepada siswa penerima, dan ternyata didapati memang keadaan ekonomi keluarga beberapa siswa cukup terbantu dengan adanya MBG dan uang saku dari setiap siswa juga bisa ditabung untuk kebutuhan sekolah lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Dhani selaku siswa yang dijadikan sebagai narasumber yaitu :

“Ada MBG ini kami bisa nabung. Lalu gak kesiangan ke sekolah karena harus menyiapkan bekal. Tapi kadang bekalnya juga hanya mi instant biar cepat. Sekarang saya dan teman-teman merasa terbantu karena sudah dapat MBG untuk sarapan sehat juga menunya dan enak.”

Selain itu, ada pula motivasi baru yang dirasakan oleh siswa SDN Kraton 1 Bangkalan terkait adanya MBG di sekolah mereka. Keterangan tersebut diberikan langsung oleh Kepala Sekolah SDN Kraton 1 yang menyaksikan berbagai perubahan oleh siswa. Hasil wawancara tersebut antara lain :

“Anak-anak itu senang. Datang pagi, kalau MBG datang telat sedikit saja langsung tanya MBGnya mana MBGnya mana. Bahkan mereka juga suka memberi surat cinta. Isinya request kepada SPPG untuk menu selanjutnya biar mereka semangat belajar. Tapi, memang untuk beberapa makanan tertentu mereka juga tidak doyan. Seperti sayur mayur. Sebetulnya sayur mayurnya itu bagus itu, tapi mungkin anak-anak kurang terbiasa. Tapi kami selalu menyuruh mereka itu ‘Ini sayur bagus buat dimakan ada wortel, kacang polong. Jadi harus dimakan’.”

Dari hasil wawancara oleh Stakeholder Primer, dapat dikatakan bahwa hampir keseluruhan program berjalan lancar dan diawasi cukup ketat serta memiliki sistem yang cukup tertata rapi. Hal tersebut tidak

hanya didukung oleh hasil wawancara namun, observasi secara langsung yang diikuti oleh peneliti pada saat turut serta pada rute pembagian MBG di pagi hari. Namun, setiap program yang berjalan, pasti memiliki kendala terutama jika mengikutsertakan berbagai stakeholder atau pemangku kebijakan. Setiap stakeholder sempat mengalami kesulitan pada bagian logistik dan anggaran serta bentuk koordinasi kepada pemangku kebijakan lainnya dalam perjalanan program MBG ini. Di sisi lain, program ini juga memberikan dampak positif cukup baik dalam proses belajar mengajar siswa dan tenaga pendidik terutama pada proses dan motivasi yang didapat untuk beraktifitas dan dididik serta mendidik.

2. Variabel Stakeholder Pendukung (Sekunder) ¹⁰⁶

Stakeholder pendukung (sekunder) merupakan pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional program, namun memiliki peran dalam memberikan dukungan, fasilitasi, koordinasi, maupun pengaruh terhadap keberlangsungan implementasi kebijakan. Keterlibatan stakeholder sekunder berfungsi untuk mendukung terciptanya pelaksanaan program yang berjalan sesuai tujuan.

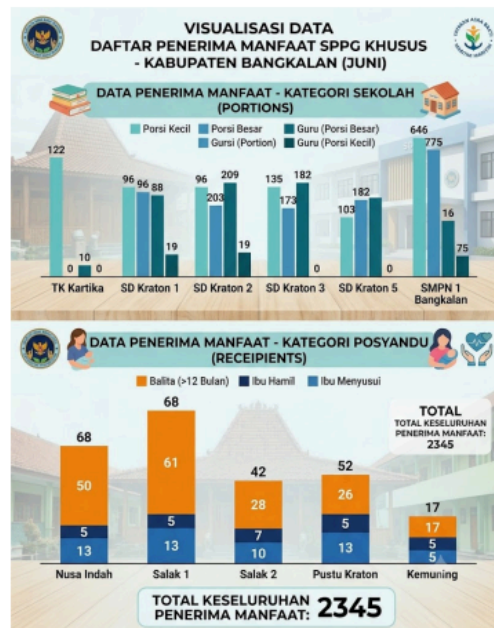
a. OPD (Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan)

Pemang ⁹⁵ yang menjadi bagian dari Stakeholder Pendukung atau Sekunder adalah dinas-dinas terkait, yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Dalam perannya, OPD terkait memiliki peran cukup penting dalam pengawasan dan penentuan arah sesuai regulasi BGN dan pedoman Juknis Juklak BGN terkait penyerasian pelaksanaan program MBG. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di OPD terkait yaitu Dinas Kesehatan, peneliti mendapatkan informasi terkait pelaksanaan program dari Nutritions (Ahli Gizi) di Dinas Kesehatan sebagai berikut :

“Sejauh ini kita hanya melakukan supervisi ke lapangan, evaluasi belum ada program seperti itu. Kami hanya monitoring, inspeksi kesehatan ke SPPG, kemudian evaluasi standar porsi dan standar menu. Seharusnya memang kami melakukan survey dulu, namun, sejauh ini yang melakukan survey langsung dari Badan Gizi Nasionalnya. Kami juga mengeluarkan sertifikat kebersihan SLHS.”

Data untuk sejumlah penerima yang nantinya akan diberikan kepada SPPG juga berasal dari Dinas Kesehatan yang sebelumnya survey masyarakat yang nantinya menjadi calon penerima bantuan Program Makan Bergizi Gratis.

Gambar 4.12 Data Infografis Hasil Survey Penerima MBG Dinas Kesehatan 2026



Sumber : Data olahan peneliti berdasarkan data internal Dinas Kesehatan, Juni 2026

Terkait koordinasi antar OPD juga sudah dilakukan oleh SATGAS yang dibentuk untuk mengontrol penerima manfaat MBG yaitu siswa sekolah, tenaga pendidik, dan B3 (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita) dengan SPPG terkait. Dinas Kesehatan sendiri belum mendapatkan ketentuan tugas khusus. Dalam hasil wawancara hal tersebut juga disampaikan langsung oleh Ahli Gizi dari Dinas Kesehatan yaitu :

“Kami tidak ada tugas khusus juga karena yang mendata juga Puskesmas. Kami hanya melakukan kontrol yang sekarang juga sudah dilaksanakan oleh SATGAS bentukan untuk MBG dan kami juga biasanya melakukan diskusi dengan PERSAGI atau Persatuan Ahli Gizi Indonesia terkait pelaksanaan MBG ini.”

Selain itu, dari Dinas Pendidikan juga membenarkan bahwa OPD terkait hanya melakukan pengenalan, edukasi, dan kontrol terhadap penerimaan MBG di setiap sekolah. Peneliti juga menggali informasi terkait hal tersebut dengan isi :

“Kami di ranah pendidikan cukup untuk memberi edukasi di awal sebelum program berjalan. Untuk sisanya sudah dilakukan oleh SATGAS yang baru dibentuk 2025 akhir mendekati tahun baru untuk membantu mengkoordinasi antar OPD. Untuk edukasi terkait gizi biasa kami lakukan ke tenaga pendidik, siswa, maupun penyuluhan ke orang tua langsung.”

Kendala yang dialami hanya pada administrasi yang bisa mengintegrasikan laporan-laporan terkait MBG oleh OPD, SPPG, maupun sekolah penerima manfaat. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari pihak Dinas Kesehatan yaitu :

“Paling kesulitan administrasi saja. Padahal kan kita sudah di era digital. Tapi jalan untuk koordinasi langsung cepat secara otomatis belum ada. Jadi kebanyakan hanya kirim data lewat WA dan konfirmasi manual tidak dalam sistem. Ada namanya SRIKANDI, tapi untuk arsip saja.”

Kesimpulan yang dapat dilihat adalah, OPD dalam program ini yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan memiliki fungsi sebagai jembatan antara program dengan penerima manfaat. Walaupun tidak banyak hambatan yang dirasakan, namun tetap membuat OPD cukup kewalahan terkait integrasi sistem laporan sebagai bentuk koordinasi perjalanan program MBG secara digital dan otomatis.

b. DPRD Komisi D

103
Dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan, salah satu pihak yang terlibat sebagai stakeholder kunci adalah DPRD Kabupaten Bangkalan, khususnya melalui ruang lingkup kerja Komisi D. Secara umum, ruang lingkup pengawasan Komisi D meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan kesejahteraan masyarakat, ketenagakerjaan, kebudayaan, pariwisata, agama, kepemudaan, dan olahraga. Dalam kaitannya dengan Program Makan Bergizi Gratis, peran tersebut terutama terlihat pada aspek pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan program di lingkungan pendidikan, pemenuhan gizi, serta dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai kelompok penerima manfaat.

Gambar 4.13 Butir Pernyataan Keikutsertaan Komisi D DPRD

- a. Identifikasi stakeholders yang potensial.
Stakeholders yang dimaksud dapat mencakup
- 1) Birokrasi: pemimpin daerah, lintas sektor, badan perencanaan pembangunan daerah dan aparaturnya.
 - 2) Legislatif: khususnya, Komisi yang menangani bidang kesejahteraan rakyat, Komisi Anggaran serta komponen lain dalam DPRD pada umumnya.
 - 3) Organisasi/lembaga non-pemerintah: pers, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi berbasis komunitas, LSM, asosiasi profesi, organisasi akademik/universitas/sekolah, korporasi/perusahaan.

89

Sumber : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014

Hal tersebut didukung dengan adanya hasil wawancara dengan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan yang menggambarkan :

“Kami lebih ke kesejahteraan rakyatnya. Mulai dari pendidikan, kesehatan seperti MBG ini, sosial, pariwisata dan yang terkenal di Bangkalan dari slogan Bangkalan Kota Santri adalah keagamaannya.”

Tugas pokok dan fungsi dari DPRD Bangkalan Komisi D ini dalam program MBG merupakan menjalankan fungsi pengawasan dan dukungan terhadap penyelenggaraan program di tingkat daerah.

Keterlibatan DPRD bukan dalam teknis distribusi maupun penyedia, melainkan pada fungsi kelembagaan yang mendukung keberlangsungan implementasi kebijakan.

Secara operasional, tugas DPRD dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis meliputi beberapa hal. Pertama, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan, termasuk memantau kesesuaian pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan serta memastikan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang terlibat serta pemantauan terhadap pelaksanaan program pada satuan pendidikan penerima manfaat. Dalam susunan wawancara, peneliti mendapatkan pernyataan yang berisi :

“DPRD hanya oprasional saja. sisanya dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait yang memang memiliki kewenangan. Sedangkan kami tidak. Tugas kami hanya pelaksanaan pengawasan, koordinasi dan komunikasi perangkat daerah, dan memberikan rekomendasi atas permasalahan yang sempat terjadi di berbagai SPPG. Evaluasi juga belum sempurna pelaksanaannya, jadi kami usahakan untuk memantau hasil program dan apa perbaikan yang perlu dibenahi.”

13 Kedua, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam fungsi ini, DPRD menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah daerah maupun pihak pelaksana program apabila terdapat masukan, kebutuhan, ataupun kendala yang ditemukan selama pelaksanaan kebijakan.

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan yang disampaikan oleh narasumber dari DPRD Kabupaten Bangkalan:

“DPRD pada dasarnya menerima berbagai masukan dari masyarakat maupun pelaksana di lapangan terkait pelaksanaan

Program Makan Bergizi Gratis. Masukan tersebut kemudian kami sampaikan kembali kepada pihak yang berwenang sebagai bahan evaluasi maupun tindak lanjut agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Kan itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pakainya UU no. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kalau MBG-nya sendiri menggunakan Peraturan Presiden tentang Badan Gizi Nasional di No 83 Tahun 2024 itu. Tidak ada regulasi lain selain regulasi pusat.”

Ketiga, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program serta mendukung sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.

Koordinasi tersebut dilakukan melalui komunikasi dengan perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pelaksanaan di lapangan, perkembangan program, serta kebutuhan yang muncul selama implementasi berlangsung.

Hal tersebut juga disampaikan oleh narasumber dari DPRD Kabupaten Bangkalan:

“Untuk mendukung pelaksanaan program, kami melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Tujuannya agar pelaksanaan program di daerah dapat berjalan selaras dan informasi yang berkembang di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.”

3. Variabel Stakeholder Kunci (Key)

Sementara itu, stakeholder kunci merupakan pihak yang memiliki kewenangan formal dalam pengambilan keputusan strategis,

baik terkait pengaturan kebijakan, dukungan kelembagaan, maupun proses pengawasan terhadap pelaksanaan program. Posisi stakeholder kunci menjadi penting karena berpengaruh terhadap arah pelaksanaan dan keberlanjutan program.

Pada kebijakan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bangkalan, pemangku kepentingan kunci dipegang oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG menempati posisi sentral dalam pelaksanaan MBG karena bertanggung jawab terhadap seluruh rantai layanan program, mulai dari perencanaan kebutuhan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, pengendalian mutu dan keamanan pangan, distribusi makanan, hingga pelaporan pelaksanaan program kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Kewenangan tersebut menjadikan SPPG sebagai pelaksana utama yang berinteraksi langsung dengan seluruh kelompok penerima manfaat maupun stakeholder lainnya, seperti sekolah, Posyandu, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, pemasok bahan pangan, dan pemerintah daerah.

Gambar 4.14 Strategi Pelaksanaan Program MBG

Strategi pelaksanaan program MBG dilakukan dengan:

- a. Mendirikan/membentuk 35.000 – 40.000 SPPG, yang meliputi 27.000 – 30.000 SPPG Aglomerasi dan 8.000 – 10.000 SPPG di wilayah terpencil atau menyesuaikan dengan arahan Presiden dan/atau perkembangan jumlah penerima manfaat yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia sejak Tahun 2025 hingga Tahun 2026 secara bertahap.
- b. Melakukan kolaborasi dengan instansi pemerintah dan kelembagaan lainnya seperti TNI/POLRI dan Pihak Ketiga (Swasta, Yayasan, Organisasi Masyarakat) dalam pendirian dan pengelolaan SPPG.
- c. BGN dan Kementerian Pekerjaan Umum berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah mendirikan SPPG dengan menggunakan dana APBN.

- e. Pemerintah daerah memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan SPPG di wilayahnya. Pengadaan bahan baku harus menggunakan produk yang dihasilkan oleh UMKM, BUMDesa, Koperasi (termasuk Koperasi Desa/Kopdes Merah Putih), peternakan rakyat, nelayan, dan usaha masyarakat lokal lainnya di sekitar SPPG.
- f. Bahan pangan yang digunakan oleh SPPG harus berdasarkan referensi survei harga pasar lokal secara langsung dilakukan oleh Kepala SPPG dan Pengawas Keuangan.

Sumber : Juknis BGN, 2025

Selain memiliki kewenangan yang besar, SPPG juga menguasai sumber daya utama yang dibutuhkan dalam implementasi program, seperti dapur produksi, tenaga pengelola, tenaga ahli gizi, armada distribusi, jaringan pemasok bahan pangan, serta data operasional penerima manfaat. Keberadaan sumber daya tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas layanan, ketepatan waktu distribusi, dan keberlanjutan pelaksanaan program.

Gambar 4.15 Alur Koordinasi BGN Lintas Sektor



Sumber : Juknis BGN, 2025

Berdasarkan bagan koordinasi lintas sektor ¹⁰ Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan institusi utama yang berada pada tingkat nasional dan memiliki kewenangan

dalam merumuskan kebijakan, standar, pedoman teknis, serta pengawasan penyelenggaraan program. Dalam struktur pelaksanaan program, BGN berkoordinasi secara langsung dengan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana di lapangan.

Hubungan koordinasi tersebut menunjukkan bahwa SPPG merupakan perpanjangan tangan BGN dalam mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis di daerah. Melalui mekanisme ini, berbagai kebijakan, petunjuk teknis, standar menu, standar keamanan pangan, target penerima manfaat, serta sistem pelaporan yang ditetapkan oleh BGN disampaikan secara langsung kepada SPPG untuk dilaksanakan. Sebaliknya, SPPG bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan, capaian program, serta berbagai kendala yang ditemui di lapangan kepada BGN melalui jalur koordinasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Bangkalan, keberhasilan penyaluran makanan bergizi kepada siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui sangat bergantung pada kapasitas SPPG dalam mengelola proses produksi dan distribusi makanan setiap hari. Bahkan ketika terjadi keterlambatan pencairan anggaran, SPPG tetap menjadi aktor utama yang mencari solusi operasional agar layanan MBG tetap berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan maupun kegagalan implementasi program sangat dipengaruhi oleh kinerja SPPG.

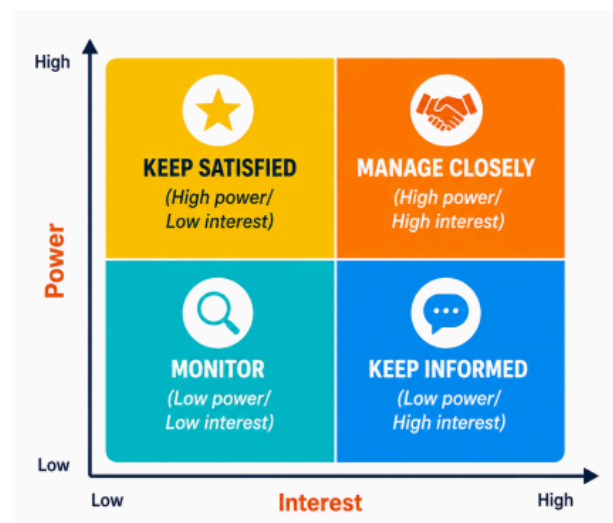
4.2 Pembahasan

4.2.1 Kerangka Analisis Stakeholder Freeman dalam Implementasi Kebijakan MBG

Implementasi suatu kebijakan publik selalu melibatkan jaringan aktor yang beragam dengan peran, kepentingan, dan pengaruh yang berbeda-beda. Untuk memahami dinamika tersebut secara sistematis, penelitian ini menggunakan kerangka Stakeholder Analysis yang diperkenalkan oleh R. Edward Freeman (1984). Dalam teorinya, Freeman mendefinisikan stakeholder

sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan suatu organisasi atau kebijakan. Kerangka ini menekankan bahwa keberhasilan sebuah program sangat ditentukan oleh sejauh mana hubungan antara organisasi dan seluruh pemangku kepentingannya dikelola secara efektif, inklusif, dan berorientasi pada nilai bersama.

Gambar 4.16 Power & Interest Matrix



Sumber : Hasil olahan peneliti, 2026

Freeman⁴¹ mengklasifikasikan stakeholder berdasarkan dua dimensi utama, yaitu tingkat kepentingan (interest) dan tingkat pengaruh (power), yang kemudian divisualisasikan dalam matriks power-interest empat kuadran: (1) Manage Closely atau Key Players, yakni pihak berpengaruh tinggi dan berkepentingan tinggi; (2) Keep Satisfied, pihak berpengaruh tinggi namun kepentingan rendah; (3) Keep Informed, pihak berkepentingan tinggi namun pengaruhnya rendah; dan (4) Monitor, pihak dengan keduanya rendah. Selain klasifikasi berbasis matriks, Freeman juga membedakan keterlibatan stakeholder menjadi tiga lapisan: stakeholder primer yang terlibat langsung dan operasional,

stakeholder sekunder yang berperan secara pendukung atau pengawasan, serta stakeholder kunci yang memegang otoritas formal dan strategis.

A. Pendistribusian ¹ Makan Bergizi Gratis

Pendistribusian ¹ Program merupakan salah satu komponen paling kritis dalam implementasi Program makan Bergizi Gratis, karena di tahap ini makanan bergizi yang telah diproduksi oleh SPPG bertemu dengan penerima manfaat. Kualitas sistem distribusi tidak hanya ditentukan oleh ketepatan waktu pengiriman, tetapi juga mencakup integritas keamanan pangan panjang dalam rantai pengiriman, mekanisme akuntabilitas serah terima, pemantauan suhu makanan, penanganan keluhan kualitas, edukasi gizi kepada penerima, hingga pemantauan status gizi sebagai indikator dampak program. Berdasarkan temuan lapangan di SPPG Kodim 0829 Kabupaten Bangkalan, bagian ini menganalisis kesesuaian sistem distribusi yang berjalan dengan ketentuan ¹⁴ Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026, sekaligus mengkaji dimensi distribusi dalam kerangka Stakeholder Analysis Freeman.

Analisis dilakukan secara komprehensif terhadap 11 aspek distribusi yang meliputi : jadwal dan waktu distribusi, armada dan wadah pengiriman, radius jangkauan, mekanisme Berita Acara Serah Terima (BAST), distribusi ke kelompok 3B melalui posyandu, evaluasi sisa makanan, edukasi gizi, pemantauan status gizi, pengendalian mutu dan keamanan

pangan, kemitraan distribusi berbasis MoU, serta integrasi dengan program Gerakan Sekolah Sehat. data lapangan diperoleh dari wawancara mendalam dengan Kepala SPPG Kodim 0829, Kepala Sekolah SDN Kraton 1, PIC MBG SMPN 1 Bangkalan, siswa penerima manfaat, Ahli Gizi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, serta dari hasil observasi langsung pada rute distribusi pagi hari dan dokumen internal SPPG.

Sistem distribusi MBG di SPPG Kodim 0829 dimulai setiap pagi pukul 05.30 WIB ketika tiga armada kendaraan distribusi berangkat membawa ompreng (foodtray) yang berisi makanan bergizi menuju sekolah-sekolah penerima manfaat sesuai rute yang telah ditetapkan. Makanan tiba di sekolah sebelum kegiatan senam pagi dimulai pukul 07.00 WIB. Pada pukul 07.30 WIB, setelah senam pagi selesai, siswa menerima dan mengonsumsi MBG sebagai menu sarapan. Total penerima manfaat yang dijangkau SPPG Kodim 0829 mencakup enam satuan pendidikan (TK Kartika, SDN Kraton 1, 2, 3, dan 5, serta SMPN 1 Bangkalan) dengan total 2.088 penerima dari kelompok sekolah, serta 257 penerima dari lima kelompok Posyandu yang didistribusikan menyesuaikan jadwal buka Posyandu. Distribusi ke Posyandu dijadwalkan mengikuti ritme kegiatan masing-masing Posyandu tanpa jadwal tetap yang baku setiap harinya

1. Analisis Kesesuaian dengan Juknis BGN dan Perspektif Freeman

Juknis BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 mendefinisikan makan pagi sebagai makanan yang diberikan pada rentang waktu pukul 06.00 hingga 09.00 dengan kandungan gizi yang berkontribusi 20 hingga 25 persen Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian penerima manfaat. Dengan pemberangkatan distribusi pukul 05.30 dan konsumsi oleh siswa pada pukul 07.30 setelah senam pagi, jadwal yang diterapkan SPPG Kodim 0829 sepenuhnya berada dalam rentang yang ditetapkan Juknis. Ini merupakan aspek distribusi yang paling konsisten kesesuaiannya antara ketentuan normatif dan praktik lapangan

Dari perspektif Stakeholder Analysis Freeman, keberhasilan SPPG mempertahankan jadwal distribusi yang tepat waktu secara konsisten merupakan bukti nyata dari kapasitas manajemen Key Player yang handal. Freeman menekankan bahwa stakeholder kunci yang efektif adalah pihak yang mampu mengalokasikan dan mengelola sumber daya secara optimal untuk memenuhi ekspektasi semua pemangku kepentingan. Kedisiplinan jadwal SPPG Kodim 0829 tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga membangun kepercayaan dari sekolah penerima manfaat sebagai stakeholder primer, yang tercermin dari antusiasme siswa dalam menunggu kedatangan MBG.

Peneliti berpendapat bahwa konsistensi jadwal distribusi yang dijalankan SPPG Kodim 0829 merupakan pencapaian

operasional yang sangat signifikan, mengingat kompleksitas logistik yang harus dikelola setiap hari: memproduksi lebih dari 2.345 porsi makanan, mengemas dalam ompreng individual, mendistribusikan ke enam sekolah dan lima Posyandu, serta memastikan serah terima terdokumentasi melalui BAST, semuanya harus selesai sebelum pukul 09.00 WIB. Konsistensi ini telah menciptakan modal sosial yang berharga berupa kepercayaan dari penerima manfaat dan satuan pendidikan, yang merupakan salah satu indikator keberhasilan manajemen stakeholder menurut Freeman. Namun peneliti juga mencatat bahwa keberhasilan ini masih sangat bergantung pada komitmen personal tim SPPG, bukan pada sistem yang dapat beroperasi secara mandiri jika terjadi pergantian personel.

2. Mekanisme BAST: Kekuatan Akuntabilitas di Tingkat Sekolah, Celah di Tingkat Posyandu

Setiap proses distribusi makanan dari SPPG Kodim 0829 ke sekolah penerima selalu disertai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST). Format BAST yang digunakan memuat identitas pihak pertama (SPPG Kodim 0829) dan pihak kedua (nama sekolah dan nama penerima), tanggal serah terima, jumlah paket yang diterima, serta waktu penyerahan (pagi atau siang). Dokumen ini ditandatangani oleh asisten lapangan SPPG dan tenaga pendidik yang ditugaskan sebagai PIC MBG di sekolah bersangkutan. PIC MBG di SMPN 1 Bangkalan menjelaskan prosedur tersebut: 'Setiap anak-anak sudah mendapatkan makanan oleh setiap perwakilan kelas, Pak Sukri menyerahkan dokumen ini.

Saya nanti tanda tangan disini, lalu dikembalikan ke beliau.' Mekanisme BAST ini berjalan setiap hari dan menjadi bukti formal bahwa penyerahan makanan telah dilaksanakan sesuai jumlah yang disepakati. Namun, data lapangan tidak menyebutkan adanya dokumen BAST serupa untuk distribusi ke kelompok Posyandu.

Juknis BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 mendefinisikan BAST sebagai dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi penyerahan paket MBG dan merupakan bagian dari sistem akuntabilitas program yang wajib dilaksanakan. Dalam praktiknya di tingkat sekolah, SPPG Kodim 0829 telah melaksanakan mekanisme ini dengan tertib dan konsisten setiap hari. Ini merupakan salah satu aspek distribusi yang paling sesuai dengan ketentuan Juknis. Keberadaan BAST yang terdokumentasi setiap hari juga menjadi fondasi laporan pelaporan keuangan harian karena mencatat bukti penyaluran manfaat yang dapat diverifikasi.

Namun, untuk distribusi ke kelompok 3B di Posyandu, tidak ditemukan dokumentasi BAST yang setara dalam data lapangan. Padahal Juknis menegaskan bahwa setiap penyaluran harus tercatat dan dapat diverifikasi, dengan kader sebagai pendamping yang memastikan paket dikonsumsi oleh penerima. Dalam perspektif Freeman, ketiadaan dokumen akuntabilitas untuk distribusi Posyandu merupakan kelemahan dalam sistem hubungan antara SPPG dengan kelompok penerima manfaat 3B. Kelompok ini berada dalam posisi Subjects, kepentingan sangat

tinggi, pengaruh sangat rendah, sehingga memerlukan mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat dari pihak penyelenggara untuk melindungi kepentingan mereka, bukan sebaliknya.\

Peneliti menemukan adanya asimetri akuntabilitas yang signifikan dalam sistem distribusi SPPG Kodim 0829: penerima manfaat dari kelompok sekolah mendapat perlindungan akuntabilitas yang kuat melalui BAST harian, sementara kelompok 3B di Posyandu, yang secara kesehatan justru merupakan kelompok paling rentan, tidak memiliki mekanisme pencatatan serah terima yang setara. Dalam kerangka Freeman, kondisi ini berarti bahwa kelompok subjects yang seharusnya mendapat perhatian terbesar justru memiliki perlindungan formal yang paling lemah. Peneliti merekomendasikan agar SPPG Kodim 0829 mengembangkan format BAST khusus untuk distribusi Posyandu, yang dapat ditandatangani oleh kader Posyandu sebagai perwakilan penerima manfaat 3B, sehingga akuntabilitas distribusi berjalan secara setara untuk semua kelompok sasaran program.

3. Pengendalian Mutu dan Keamanan Pangan:

HACCP Diterapkan, Pengawasan Bahan Baku

Masih Lemah

Dalam proses pengolahan makanan di dapur SPPG Kodim 0829, standar HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) diterapkan oleh Divisi Pengolahan, yang mencakup pengawasan suhu kematangan dan penanganan

pangan pasca pengolahan. Pengawas Gizi bertugas mengawasi bahan baku yang datang sesuai standar yang dibutuhkan dapur, mulai dari penerimaan hingga packing sesuai nilai gizi. Namun, terlepas dari sistem yang ada, penelitian menemukan adanya insiden kualitas yang cukup serius: seorang siswa penerima manfaat kelas 8 SMPN 1 Bangkalan melaporkan ditemukannya ulat kecil pada buah anggur di dalam ompreng. Kejadian ini menyebabkan sejumlah siswa membuang buahnya dan tidak mendapatkan penggantian. Selain itu, terdapat keluhan dari wali murid terkait ukuran buah yang terlalu kecil dan kualitas buah yang dinilai kurang memadai, yang sempat disampaikan kepada pihak sekolah dan diteruskan secara informal kepada asisten lapangan SPPG. Kepala Sekolah SDN Kraton 1 menyatakan: 'Entah buahnya kecil atau buahnya asam. Namun, kami langsung sampaikan ke pihak SPPG yang berkeliling meminta tanda tangan seperti Bapak Sukri ini.

Juknis BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 mewajibkan pengecekan fisik makanan, meliputi warna, aroma, dan tekstur, sebelum distribusi, penyimpanan sampel makanan harian di lemari pendingin sebagai kontrol mutu, serta penerapan standar HACCP dalam seluruh proses produksi. Selain itu, Pengawas Gizi SPPG wajib mengawasi bahan baku yang datang sesuai standar sejak penerimaan hingga pengepakan. Temuan insiden ulat pada buah anggur menunjukkan adanya celah dalam proses pemeriksaan bahan baku sebelum masuk ke lini pengolahan. Buah anggur, sebagai produk yang dikonsumsi tanpa proses pemanasan, seharusnya mendapatkan inspeksi

visual dan fisik yang lebih ketat di tahap penerimaan bahan baku maupun saat pemorsian. Celah inilah yang menyebabkan kontaminasi fisik lolos hingga sampai ke tangan penerima manfaat.

Dari perspektif Freeman, insiden kualitas ini memiliki implikasi yang melampaui persoalan teknis semata. Ketika penerima manfaat, yang berada dalam posisi Subjects dengan kepentingan tertinggi namun pengaruh terendah, menemukan kontaminasi dalam makanan yang mereka terima, reaksi pertama yang muncul adalah ketidakpercayaan terhadap program. Namun tidak ada mekanisme formal yang memungkinkan mereka melaporkan dan mendapatkan respons yang terstruktur. Freeman menekankan bahwa ketika stakeholder primer mengalami kegagalan layanan, kecepatan dan kualitas respons dari organisasi menentukan apakah kepercayaan dapat dipertahankan atau justru erosi. Fakta bahwa keluhan hanya disampaikan secara informal kepada asisten lapangan tanpa ada prosedur eskalasi, investigasi, atau kompensasi yang jelas menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keluhan dalam rantai distribusi MBG belum memadai.

Lebih jauh, insiden makanan basi yang viral di media sosial TikTok pada September 2025, meskipun melibatkan SPPG Martajasah, bukan SPPG Kodim 0829, memperlihatkan bahwa masalah kualitas pangan dalam distribusi MBG di Kabupaten Bangkalan bukan hanya insiden terisolasi. Respons DPRD yang menggelar rapat koordinasi segera setelah kasus

viral menunjukkan bahwa sistem pengawasan kualitas yang ada baru bergerak setelah masalah menjadi konsumsi publik, bukan sebelumnya. Ini adalah pola yang oleh Freeman disebut sebagai reactive stakeholder management, sebuah pendekatan yang mengorbankan kepercayaan stakeholder demi menghindari konflik yang seharusnya dapat dicegah.

Peneliti berpendapat bahwa insiden ditemukannya ulat pada buah anggur dalam ompreng SPPG Kodim 0829, meskipun mungkin tampak sebagai kejadian tunggal yang terisolasi, sebenarnya merupakan sinyal dari kelemahan sistemik dalam rantai pengendalian mutu distribusi MBG. Jika inspeksi bahan baku di tahap penerimaan telah berjalan dengan benar sesuai Juknis BGN, kontaminasi fisik pada buah seharusnya terdeteksi sebelum masuk ke dapur pengolahan. Ketiadaan mekanisme pengaduan formal yang memungkinkan penerima manfaat melaporkan insiden semacam ini secara terdokumentasi dan mendapat respons terstruktur merupakan kegagalan dalam membangun sistem umpan balik yang, menurut Freeman, merupakan prasyarat bagi manajemen stakeholder yang efektif. Peneliti merekomendasikan agar SPPG Kodim 0829 memperkuat protokol inspeksi bahan baku, khususnya untuk produk yang dikonsumsi tanpa proses pemanasan (buah, susu UHT), dan segera membangun mekanisme pengaduan formal yang responsif dari penerima manfaat.

4. Dampak Positif Distribusi yang Teridentifikasi:

Perubahan Nyata di Tingkat Penerima Manfaat

Di balik berbagai kesenjangan yang ditemukan, sistem distribusi MBG yang dijalankan SPPG Kodim 0829 telah menghasilkan sejumlah dampak positif yang nyata dan dapat diverifikasi dari berbagai sumber. Pertama, peningkatan motivasi kehadiran dan belajar siswa. PIC MBG SMPN 1 Bangkalan menyatakan bahwa motivasi belajar dan datang ke sekolah meningkat signifikan sejak program berjalan. Siswa yang sebelumnya sering terlambat karena harus menyiapkan bekal kini datang lebih awal karena program MBG sudah tersedia di sekolah. Kedua, efek ekonomi positif pada rumah tangga siswa. Siswa dapat menabung uang saku yang sebelumnya digunakan untuk membeli makanan, dengan dampak nyata seperti yang dialami salah satu siswa yang berhasil membeli sepatu sekolah yang layak dari tabungan uang sakunya. Dhani, siswa kelas 8, membenarkan: 'Ada MBG ini kami bisa nabung. Lalu gak kesiangan ke sekolah karena harus menyiapkan bekal.

Ketiga, penerimaan yang sangat positif terhadap kualitas menu. Kirana, siswa kelas 8 SMPN 1 Bangkalan, menyatakan bahwa makanan MBG selalu habis dikonsumsi oleh seluruh anggota kelasnya. Kepala Sekolah SDN Kraton 1 mengonfirmasi bahwa siswa bahkan secara aktif mengirimkan 'surat cinta' berisi permintaan menu kepada SPPG. Keempat, potensi dampak pada penurunan stunting. Dengan prevalensi stunting Kabupaten Bangkalan yang telah menurun dari 26,2

persen pada 2022 menjadi 10,2 persen pada 2023, program MBG yang menjangkau kelompok 3B secara rutin diharapkan dapat berkontribusi pada percepatan penurunan lebih lanjut, meskipun kausalitas langsung belum dapat dibuktikan tanpa data pemantauan status gizi yang sistematis.

Peneliti mengakui bahwa dampak-dampak positif yang teridentifikasi dari distribusi MBG SPPG Kodim 0829, peningkatan kehadiran siswa, efek tabungan ekonomi rumah tangga, dan antusiasme penerimaan menu, merupakan bukti empiris awal yang sangat berharga tentang potensi program ini. Namun, tanpa sistem pemantauan yang terstruktur, dampak-dampak ini baru dapat diungkapkan secara anekdotal melalui wawancara, bukan melalui data terukur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam perspektif Freeman, stakeholder, termasuk BGN, Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat luas, berhak mendapatkan data yang valid tentang efektivitas program yang didanai oleh anggaran publik. Peneliti merekomendasikan agar pembangunan sistem pemantauan dampak distribusi MBG menjadi prioritas segera, mencakup pengukuran indikator antropometri siswa per semester, survei kehadiran, data ekonomi rumah tangga, dan pemantauan status gizi kelompok 3B di Posyandu.

²³ B. Penggunaan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

Aspek anggaran merupakan salah satu dimensi kritis ¹ dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena menyangkut keberlanjutan operasional program secara langsung.

Ketersediaan dana yang cukup, tepat waktu, dan dikelola secara akuntabel merupakan prasyarat mutlak agar SPPG dapat menjalankan seluruh rantai layanan program, mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga pelaporan, tanpa hambatan. Berdasarkan temuan lapangan di SPPG Kodim 0829 Kabupaten Bangkalan, ditemukan sejumlah kondisi anggaran yang perlu dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan normatif yang berlaku, yaitu Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.

Juknis tersebut mengatur secara komprehensif mekanisme pembiayaan program MBG, mencakup sumber dana, mekanisme pencairan, pagu satuan per penerima manfaat, struktur komponen biaya, pengadaan bahan baku, pertanggungjawaban keuangan, hingga pengawasan anggaran di tingkat daerah. Dengan menggabungkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan ketentuan normatif Juknis BGN, bagian ini akan mengidentifikasi aspek-aspek pengelolaan anggaran yang telah berjalan sesuai ketentuan, aspek yang belum sepenuhnya terlaksana, serta aspek yang memerlukan perhatian khusus untuk perbaikan ke depan.

1. Realitas Anggaran di Tingkat Implementasi

Aspek anggaran merupakan salah satu variabel paling kritis sekaligus paling rentan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan hasil penelitian yang mencakup wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumentasi, ditemukan bahwa perjalanan program ini, terutama pada fase

awal implementasi, menghadapi persoalan serius terkait ketidakselarasan antara ketentuan yang termuat dalam regulasi nasional dengan realitas pengelolaan anggaran di tingkat operasional. Persoalan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan erat dengan desain sistem pendanaan, kapasitas kelembagaan pelaksana, dan pola koordinasi antarstakeholder yang belum sepenuhnya matang.

Secara normatif, pendanaan Program MBG di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam regulasi tersebut, khususnya Pasal 59 ayat (1), dinyatakan secara eksplisit bahwa sumber pendanaan utama program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 59 ayat (2) lebih lanjut mengatur bahwa pembangunan SPPG dan penyediaan sarana-prasarana dapat didanai melalui kombinasi APBN, APBD, maupun hasil kerja sama Badan Gizi Nasional (BGN), sementara Pasal 60 ayat (1) membuka ruang bagi dukungan APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konstruksi regulasi ini sekilas tampak komprehensif dan menjamin ketersediaan anggaran dari hulu ke hilir implementasi program.

Namun demikian, temuan di lapangan mengungkapkan kondisi yang berbeda secara signifikan dari apa yang dijamin oleh regulasi tersebut. Kepala SPPG Kodim 0829 Kabupaten Bangkalan, Rizkia Nur Febianti, dalam wawancara dengan

peneliti secara tegas mengakui bahwa hambatan terbesar yang dihadapi sejak awal program berjalan adalah persoalan keterlambatan pencairan anggaran operasional.

Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya jeda temporal yang signifikan antara saat operasional dapur MBG mulai berjalan dengan saat dana dari APBN sesungguhnya dapat dicairkan dan dimanfaatkan oleh SPPG. Dalam kondisi demikian, SPPG, yang secara normatif hanya berfungsi sebagai unit pelaksana teknis lapangan, terpaksa menanggung beban pembiayaan operasional sementara dengan mekanisme utang kepada pemasok bahan baku (supplier). Mekanisme talangan informal ini bukan merupakan bagian dari desain sistem pendanaan yang ditetapkan oleh BGN, melainkan solusi pragmatis yang lahir dari ketidaksiapan sistem keuangan negara dalam merespons kebutuhan operasional harian di tingkat lapangan.

Lebih jauh, temuan lapangan juga mengungkapkan bahwa mekanisme pengadaan bahan baku dilakukan melalui sistem Pre-Order (PO) kepada pemasok yang merupakan UMKM lokal di wilayah Bangkalan, dengan pembayaran menggunakan sistem e-purchase melalui Virtual Account (VA) atau secara tunai langsung. Data rencana anggaran bahan makanan SPPG Kodim 0829 untuk satu siklus pengiriman pada tanggal 1 Juni 2026 menunjukkan total pengeluaran bahan baku sebesar Rp31.357.000 untuk satu hari operasional. Angka ini mencakup 34 jenis bahan makanan mulai dari beras, daging

ayam fillet, tahu, sayuran, susu UHT, hingga bumbu-bumbu masak.

Gambaran ini menunjukkan bahwa kebutuhan operasional SPPG bersifat harian dan tidak dapat ditangguhkan. Makanan harus tersedia setiap hari kerja, sementara mekanisme pencairan dana dari pusat tidak selalu mengikuti irama operasional tersebut. Kondisi inilah yang menciptakan kesenjangan (gap) kritis antara kebutuhan kas harian SPPG dan ketersediaan dana yang terjamin oleh regulasi.

Selain persoalan keterlambatan, temuan lapangan juga mencatat bahwa perkembangan situasi anggaran telah mengalami perbaikan bertahap. Hal ini ditandai dengan mulai berjalannya pelaporan dan koordinasi antara SPPG dengan Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, meskipun intensitas pertemuan tersebut masih terbilang jarang dan cenderung hanya terjadi apabila terdapat permasalahan serius. Rencana anggaran disusun melalui diskusi antara SPPG dan ahli gizi (Nutrititions) dari Dinas Kesehatan terkait siklus menu bulanan, yang kemudian dijadikan acuan dalam pembuatan rancangan anggaran yang akan dimonitor dan dievaluasi oleh DPRD Kabupaten Bangkalan Komisi D.

Untuk memahami kesenjangan yang terjadi secara lebih komprehensif, diperlukan analisis komparatif antara mekanisme pendanaan yang diatur dalam regulasi dan petunjuk teknis dengan kondisi aktual yang ditemukan di lapangan.

Perbandingan ini menjadi penting karena memberikan gambaran tentang seberapa jauh implementasi program telah selaras atau menyimpang dari desain kebijakan yang telah ditetapkan.

a. Pencairan Dana: Antara Ketentuan dan Kenyataan

Berdasarkan ⁶⁰ Petunjuk Teknis Pembuatan Rekening SPPG dan Penggunaan Dana Makan Bergizi Gratis yang diterbitkan oleh BGN pada Januari 2025, mekanisme pencairan dana kepada SPPG diatur melalui sistem Virtual Account (VA) yang merupakan rekening khusus sebagai media penyaluran dana dari kas negara langsung kepada unit pelaksana. Sistem ini dirancang untuk memastikan tersedianya dana secara berkelanjutan tanpa harus menunggu proses administrasi yang berulang. Secara teknis, pencairan dana mensyaratkan kelengkapan dokumen administratif berupa Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahunan, Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BGN dan Yayasan pelaksana, serta verifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang kemudian menginput data SPPG dan VA ke dalam sistem SAKTI sebagai ⁶⁷ dasar proses pencairan.

¹⁰⁴ Juknis BGN Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 secara eksplisit menegaskan prinsip utama mekanisme pencairan bahwa sistem ini dirancang ¹¹ untuk "menghindari keterlambatan ketersediaan dana di VA SPPG sehingga kegiatan MBG dapat berjalan tanpa hambatan." Lebih lanjut, regulasi ini menetapkan bahwa

⁶ setiap SPPG cukup mengajukan proposal satu kali dalam setahun sebagai dokumen induk pencairan, dan PPK akan ⁶ melakukan penyaluran dana awal sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke VA SPPG yang siap beroperasi. Sistem auto top-up juga dirancang untuk mengisi ulang saldo VA secara otomatis ketika saldo turun di bawah batas tertentu, sehingga SPPG tidak perlu mengajukan pencairan secara manual berulang kali.

⁶⁴ Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI pada Mei 2025 juga menyebutkan bahwa sistem VA yang digunakan merupakan rekening bersama ⁵ yang hanya dapat dicairkan oleh dua pihak, yaitu perwakilan yayasan dan Kepala SPPG, sehingga seluruh transaksi dilakukan secara digital guna menjamin akuntabilitas. Mulai Januari 2026, BGN bahkan telah menyiapkan dana harian senilai Rp900 miliar, dengan 85 persen dialokasikan untuk pengadaan bahan baku lokal.

Namun demikian, temuan lapangan di Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa mekanisme yang dirancang demikian matang dalam regulasi tersebut tidak berjalan mulus pada fase awal implementasi program. SPPG Kodim 0829 mengalami keterlambatan pencairan yang memaksanya menggunakan mekanisme hutang kepada supplier sebagai jembatan operasional. Kondisi ini

mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain sistem dengan kapasitas eksekusi di tingkat lapangan, terutama karena program MBG dimulai pada periode transisi ketika sistem administrasi keuangan negara belum sepenuhnya siap mengakomodasi kebutuhan operasional yang bersifat harian dan masif secara simultan di seluruh Indonesia.

Tabel 4.6 Perbandingan Ketentuan Regulasi dengan Temuan Lapangan pada Aspek Anggaran Program MBG di Kabupaten Bangkalan

Aspek	Ketentuan Regulasi / Juknis BGN	Temuan Lapangan di Bangkalan
Sumber Dana	APBN (Pasal 59 ayat 1 Perpres 115/2025); APBD dan sumber sah lain sebagai pelengkap	Dana APBN menjadi sumber utama; belum ada kontribusi APBD yang signifikan untuk operasional SPPG
Mekanisme Pencairan	Melalui Virtual Account (VA); dana awal Rp500 juta; sistem auto top-up; proposal tahunan sebagai dasar pencairan (Juknis BGN No. 401.1/2025)	Keterlambatan pencairan pada fase awal; SPPG terpaksa berhutang kepada supplier untuk menjaga kelangsungan operasional
Prinsip Keuangan	At cost (biaya riil); e-purchase via VA; laporan harian	Pembayaran melalui e-purchase via VA atau tunai; pelaporan keuangan

Aspek	Ketentuan Regulasi / Juknis BGN	Temuan Lapangan di Bangkalan
	Senin–Sabtu melalui sistem digital	masih manual (WhatsApp); belum terintegrasi digital lintas stakeholder
Besaran per Penerima	11 Rp15.000 per hari per penerima manfaat (mencakup bahan baku, biaya operasional at cost, dan insentif fasilitas SPPG Rp6 juta/hari operasional)	Sesuai ketentuan; total pengeluaran bahan baku SPPG Kodim 0829 tercatat Rp31.357.000 untuk satu hari operasional (Juni 2026)
Pengadaan Bahan Baku	Wajib memprioritaskan BUM Desa, Koperasi, UMKM, peternakan rakyat, dan nelayan lokal; supplier distributor hanya jika sumber lokal tidak mencukupi (Juknis BGN 2025)	Sesuai: pengadaan melalui sistem Pre-Order (PO) kepada UMKM lokal wilayah Bangkalan; keterlambatan pembayaran pernah terjadi akibat kendala pencairan
Pengawasan Anggaran	BGN melakukan pengawasan berlapis; DPRD berfungsi sebagai pengawas daerah; Satgas MBG berkoordinasi lintas OPD	DPRD Komisi d melakukan pengawasan namun belum rutin; koordinasi lintas OPD via Satgas baru terbentuk akhir 2025; sistem

Aspek	Ketentuan Regulasi / Juknis BGN	Temuan Lapangan di Bangkalan
		pelaporan digital terintegrasi belum tersedia
Perencanaan Anggaran	Proposal tahunan sebagai dokumen induk; RAB berdasarkan kebutuhan riil lapangan; tidak perlu proposal bulanan	Perencanaan dilakukan melalui diskusi SPPG dengan Dinas Kesehatan (Nutritions); kemudian dimonitor DPRD Komisi d; belum ada Perda MBG daerah

Sumber: Diolah dari data penelitian lapangan dan regulasi nasional, 2026

b. Persoalan Besaran Anggaran dan Struktur Pembiayaan

5 Juknis BGN Tahun Anggaran 2026 menetapkan alokasi rata-rata Rp15.000 per hari per penerima manfaat yang mencakup tiga komponen terintegrasi: biaya bahan baku, biaya operasional riil (at cost), dan insentif fasilitas SPPG sebesar Rp6.000.000 per hari operasional. BGN dalam siaran pers resmi tertanggal 25 Februari 2026 menegaskan bahwa insentif Rp6 juta tersebut 3 merupakan bagian integral dalam struktur pembiayaan Rp15.000 per menu dan bukan tambahan di luar pagu anggaran. 31 Dengan asumsi kapasitas layanan maksimal 3.000 penerima manfaat per hari, insentif tersebut setara dengan Rp2.000 per porsi.

Dalam konteks SPPG Kodim 0829 yang melayani 2.345 penerima manfaat per bulan Juni 2026, terdiri dari 2.088 penerima dari kelompok sekolah dan 257 dari kelompok Posyandu, maka secara kalkulasi kasar total pagu harian yang seharusnya tersedia mencapai Rp35.175.000 ($2.345 \text{ penerima} \times \text{Rp}15.000$). Angka ini mendekati total pengeluaran bahan baku harian yang tercatat sebesar Rp31.357.000, dengan selisih yang mencerminkan komponen biaya operasional dan insentif fasilitas. Secara matematis, ketentuan pagu tersebut tampak mencukupi untuk kebutuhan operasional harian SPPG.

Persoalannya bukan terletak pada besaran pagu, melainkan pada kecepatan dan kepastian aliran dana tersebut sampai ke rekening SPPG. Ketika pencairan terlambat, meskipun hanya beberapa hari, SPPG tidak dapat menghentikan operasional produksi karena penerima manfaat, terutama siswa sekolah, membutuhkan makanan setiap hari. Inilah akar dari mekanisme talangan informal yang ditemukan peneliti: SPPG menggunakan kepercayaan yang dibangun dengan pemasok lokal (UMKM) sebagai pengganti sementara dari dana negara yang seharusnya tersedia tepat waktu.

Kondisi ini mencerminkan apa yang oleh para akademisi kebijakan publik sering disebut sebagai *implementation gap* atau kesenjangan

implementasi, jarak antara apa yang diniatkan dalam desain kebijakan dengan apa yang sesungguhnya terjadi dalam praktik (Pressman & Wildavsky, 1973). Dalam kasus MBG Bangkalan, kesenjangan ini tidak disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan oleh ketidakselarasan antara ritme birokratis sistem keuangan negara dengan ritme operasional layanan publik yang bersifat harian dan tidak terputus.

Tabel 4.7 Analisis Kesesuaian Pengelolaan Anggaran MBG
SPPG Kodim 0829 Bangkalan dengan Juknis BGN Nomor 401.1 Tahun 2025

Aspek Anggaran	Ketentuan Juknis BGN (SK No. 401.1/2025)	Temuan Lapangan (SPPG Kodim 0829 Bangkalan)	Status Kesesuaian	Analisis
Sumber Dana Utama	APBN melalui skema Bantuan Pemerintah (Banper) sesuai PMK No. 132/PMK.05/2021 (Pasal 59 ayat 1 Perpres No. 115/2025)	Dana operasional bersumber dari APBN melalui BGN. Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Pengawas Keuangan	Sesuai	

		SPPG dengan pembayaran melalui e-purchase (VA) atau tunai		
Mekanisme Pencairan Awal	PPK menyalurkan dana awal sebesar Rp500.000.000 ke VA SPPG berdasarkan proposal tahunan yang disetujui. Prinsip utama: menghindari keterlambatan dana di VA SPPG	Di awal program, pencairan anggaran mengalami keterlambatan. SPPG terpaksa menggunakan mekanisme utang (talangan) kepada pemasok bahan baku untuk memastikan operasional tetap berjalan	Tidak Sesuai	

Mekanisme Top-Up Berkala	Laporan penggunaan dana harian diinput ke SIPGN dan secara otomatis dikonversi menjadi pengajuan dana. PPK menerbitkan SPP top-up setiap Senin–Selasa. Batas saldo maksimum VA: Rp500.000.000	Laporan keuangan oleh Pengawas Keuangan dilakukan secara harian dalam sistem SPPG, namun konfirmasi top-up dari pusat tidak selalu tepat waktu, terutama pada masa awal operasional	Sebagai an Sesuai	
---	---	---	----------------------------------	--

Pagu Satuan per Penerima Manfaat	Rata-rata Rp15.000/hari/penerima manfaat (at cost), 5 mencakup komponen bahan baku + biaya operasional riil + insentif fasilitas SPPG Rp6.000.000/hari	Dokumen Rencana Anggaran Bahan Makanan SPPG Kodim 0829 (Juni 2026) menunjukkan total belanja bahan makanan sebesar Rp31.357.000 untuk satu kali pengiriman (Senin, 1 Juni 2026). Dengan 2.345 penerima manfaat, biaya bahan baku per porsi tercatat sekitar Rp13.370, belum termasuk komponen biaya operasional dan insentif fasilitas	Perlu Verifikasi	
---	--	--	-------------------------	--

Insentif Fasilitas SPPG	Rp6.000.000/hari operasional (availability-based, tidak bergantung jumlah porsi). Merupakan bagian terintegrasi dalam pagu Rp15.000, ekuivalen Rp2.000/porsi pada kapasitas 3.000 penerima	Dokumen penelitian tidak menyebutkan secara eksplisit penerimaan insentif fasilitas Rp6.000.000/hari. Kepala SPPG hanya menyebut pendanaan dari APBN secara umum tanpa merinci komponen insentif	Tidak Terdokumentasi	
Pengadaan Bahan Baku	Wajib diprioritaskan dari UMKM, BUM Desa, Koperasi (termasuk Kopdes Merah Putih), peternakan rakyat, nelayan. Supplier	SPPG Kodim 0829 telah melaksanakan pengadaan melalui sistem Pre-Order kepada supplier dari UMKM lokal di wilayah Bangkalan. Kepala SPPG	Sesuai	

	distributor hanya sebagai alternatif terakhir. Harga berdasarkan survei pasar lokal oleh Kepala SPPG dan Pengawas Keuangan	menyatakan: 'Kami melaksanakan pengadaan bahan baku melalui sistem PO kepada supplier dari UMKM'		
Pertanggungjawaban Keuangan	SPPG wajib membuat ⁶ laporan harian (untuk auto top-up) dan laporan per 2 bulan sebagai pertanggungjawaban Banper. Laporan diinput melalui sistem DIALUR/SIPGN	Perencanaan anggaran dilakukan melalui diskusi antara SPPG dan Dinas Kesehatan terkait menu bulanan. Laporan dimonitor oleh DPRD Komisi D, meskipun intensitasnya masih jarang. Belum ada sistem pelaporan	Sebagian Sesuai	

		digital terintegrasi antar-instansi		
Pengawasan Anggaran Daerah	Perpres 115/2025 Pasal 60 ayat 1: dukungan daerah dapat didanai APBD. BGN melibatkan Pemerintah Daerah (Dinas tingkat Provinsi/Kab/Kota) dalam sinkronisasi pelaksanaan program	Tidak ada regulasi daerah (Perda) khusus yang mengatur MBG di Kabupaten Bangkalan. DPRD Komisi D melakukan pengawasan anggaran, namun frekuensinya masih rendah dan bersifat reaktif. Belum ada alokasi APBD yang spesifik untuk mendukung komponen MBG	Tidak Sesuai	

Sumber : Hasil olahan peneliti, 2026

2. Analisis Aspek Anggaran dalam Perspektif Stakeholder Analysis Freeman

Aspek anggaran dalam Program MBG tidak dapat dipahami secara parsial hanya sebagai persoalan teknis keuangan semata. Dalam kerangka Stakeholder Analysis yang dikembangkan oleh R. Edward Freeman (1984), persoalan anggaran merupakan cerminan dari relasi kuasa, distribusi risiko, dan pola kepentingan di antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Freeman menegaskan bahwa sebuah program berkelanjutan tidak hanya membutuhkan ketersediaan sumber daya, tetapi juga memerlukan pengelolaan hubungan antarstakeholder yang efektif, termasuk dalam hal siapa yang menanggung risiko finansial, siapa yang memiliki kewenangan atas aliran dana, dan siapa yang merasakan dampak ketika sistem keuangan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

a. SPPG sebagai Key Player Operasional: Menanggung Beban Ganda

SPPG Kodim 0829 dalam matriks Freeman menempati kuadran Manage Closely sebagai Key Player operasional: memiliki kepentingan tinggi terhadap keberhasilan program sekaligus menjadi satu-satunya aktor yang menguasai sumber daya fisik dan manusia yang dibutuhkan untuk produksi serta distribusi makanan harian. Dalam konteks anggaran, posisi ini membawa beban ganda yang tidak proporsional.

Di satu sisi, SPPG memikul tanggung jawab penuh atas keberlangsungan produksi dan distribusi makanan, termasuk ketika dana operasional belum cair. Di sisi lain, SPPG tidak memiliki kewenangan untuk mengubah mekanisme pencairan, mempersingkat birokrasi administrasi, atau mengakses sumber dana alternatif yang bersifat resmi. Satu-satunya pilihan yang tersedia adalah memanfaatkan relasi personal dengan pemasok untuk mendapatkan kredit informal. Kondisi ini menempatkan Kepala SPPG bukan hanya sebagai manajer produksi, tetapi juga sebagai penjamin kredit tidak resmi yang menanggung risiko gagal bayar apabila pencairan terus tertunda.

Lebih jauh, temuan lapangan menunjukkan bahwa SPPG Kodim 0829 juga berperan sebagai fasilitator perencanaan anggaran yang sesungguhnya bukan merupakan mandat formalnya. Proses diskusi antara SPPG dengan ahli gizi Dinas Kesehatan dalam menyusun siklus menu bulanan yang kemudian menjadi dasar rancangan anggaran mencerminkan adanya peran substantif SPPG dalam proses perencanaan yang secara formal seharusnya dikoordinasikan di tingkat yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa SPPG tidak sekadar pelaksana teknis, tetapi juga actor penyumbang data dan analisis yang krusial bagi siklus perencanaan anggaran program.

b. DPRD Komisi D: Pengawas Anggaran yang Masih Bersifat Reaktif

Dalam kerangka Freeman, DPRD Kabupaten Bangkalan, khususnya Komisi D, berada pada kuadran Keep Satisfied dalam matriks kekuasaan-kepentingan: memiliki pengaruh kelembagaan yang signifikan melalui fungsi pengawasan dan legitimasi politik, namun keterlibatan operasionalnya dalam manajemen anggaran program sehari-hari sangat terbatas. Komisi D memiliki kewenangan untuk memantau pelaksanaan anggaran MBG, menerima laporan dari SPPG dan OPD terkait, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak yang berwenang.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran pengawasan DPRD terhadap aspek anggaran masih bersifat reaktif dan periodik, bukan proaktif dan berkelanjutan. Rapat koordinasi antara SPPG dan DPRD Komisi D lebih sering dipicu oleh permasalahan yang sudah terjadi, seperti kasus makanan yang viral di media sosial, dibandingkan oleh agenda pemantauan rutin yang terjadwal. Kondisi ini diakui oleh narasumber dari DPRD dalam wawancara yang menyatakan bahwa evaluasi program "belum sempurna pelaksanaannya."

Yang lebih krusial, ditemukan pula bahwa hingga saat penelitian ini dilakukan, belum terdapat ⁸ Peraturan Daerah (Perda) atau regulasi daerah lainnya yang secara khusus mengatur mekanisme pendanaan,

pengawasan, dan pertanggungjawaban Program MBG di tingkat Kabupaten Bangkalan. Seluruh program dijalankan semata-mata berdasarkan regulasi nasional, Perpres No. 115 Tahun 2025 dan Juknis BGN. Sebagaimana yang disampaikan narasumber dari DPRD: "Tidak ada regulasi lain selain regulasi pusat." Ketiadaan landasan hukum lokal ini menciptakan kekosongan tata kelola yang berimplikasi ganda: pertama, tidak ada mekanisme daerah yang dapat mengatur alokasi APBD sebagai penyangga ketika dana APBN terlambat; kedua, tidak ada instrumen hukum daerah yang dapat mempertegas peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholder lokal, termasuk DPRD, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, dalam siklus pengelolaan anggaran program.

Dalam perspektif peneliti, kondisi ini merupakan kerentanan struktural yang perlu segera diatasi. Freeman (1984) menegaskan bahwa ketiadaan regulasi yang mengatur hak dan kewajiban setiap stakeholder secara eksplisit berpotensi menimbulkan ambiguitas peran yang, dalam jangka panjang, akan melemahkan akuntabilitas dan keberlanjutan program. Ketika tidak ada payung hukum daerah yang mewajibkan DPRD untuk melakukan pengawasan anggaran secara rutin dan terstruktur, fungsi tersebut akan bergantung sepenuhnya pada inisiatif individu, bukan pada sistem yang terlembaga.

**c. OPD (Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan):
Aktor Pendukung tanpa Peran Anggaran yang
Terdefinisi**

Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dalam kerangka Freeman menempati posisi Keep Informed: memiliki kepentingan tinggi terhadap keberhasilan program namun pengaruhnya terhadap mekanisme anggaran sangat terbatas. Secara normatif, kedua OPD ini tidak memiliki peran yang terdefinisi secara eksplisit dalam pengelolaan atau pengawasan anggaran Program MBG. Peran anggaran utama berada sepenuhnya di bawah koordinasi BGN melalui SPPG.

Namun demikian, kedua OPD ini memiliki potensi kontribusi yang belum dioptimalkan dalam aspek anggaran. Dinas Kesehatan, misalnya, berperan dalam proses perencanaan menu melalui diskusi dengan ahli gizi yang pada akhirnya memengaruhi struktur pengeluaran bahan baku SPPG. Kontribusi ini bersifat substantif karena komposisi menu secara langsung menentukan biaya produksi per porsi. Namun karena tidak ada formalisasi peran tersebut dalam mekanisme anggaran, masukan dari Dinas Kesehatan tidak memiliki kekuatan mengikat dalam proses penentuan anggaran yang lebih tinggi.

Dinas Pendidikan, di sisi lain, memiliki data peserta didik yang akurat, data yang menjadi dasar

penentuan jumlah penerima manfaat dan besaran total anggaran yang dibutuhkan SPPG. Namun proses verifikasi dan pemutakhiran data tersebut tidak terintegrasi secara sistematis ke dalam siklus perencanaan anggaran yang dilakukan oleh BGN dan SPPG. Kondisi ini menciptakan potensi mismatch antara data penerima manfaat yang digunakan dalam penghitungan anggaran dengan kondisi riil di lapangan.

3. Identifikasi Kesenjangan: Antara Desain Sistem dan Realitas Implementasi

Berdasarkan perbandingan komprehensif antara ketentuan regulasi dengan temuan lapangan, serta analisis melalui kerangka Stakeholder Analysis Freeman, peneliti mengidentifikasi empat kesenjangan utama dalam aspek anggaran Program MBG di Kabupaten Bangkalan:

Pertama, kesenjangan temporal antara kebutuhan operasional harian SPPG dengan siklus pencairan dana yang bersifat administratif-birokratis. Kebutuhan kas SPPG bersifat harian dan tidak dapat ditunda, sementara sistem pencairan melalui VA bergantung pada kelengkapan dokumen administratif yang membutuhkan waktu verifikasi. Meskipun regulasi terbaru (Juknis 2026) telah merancang sistem auto top-up untuk mengatasi persoalan ini, temuan lapangan menunjukkan bahwa pada fase awal implementasi, sistem tersebut belum berjalan efektif.

Kedua, kesenjangan distribusi risiko antara BGN sebagai perancang sistem dengan SPPG sebagai pelaksana lapangan. BGN menetapkan standar layanan penuh tanpa jeda, namun tidak dapat menjamin ketersediaan dana yang tepat waktu pada setiap kondisi. Akibatnya, risiko finansial yang seharusnya ditanggung oleh negara melalui sistem pendanaan yang andal, dalam praktiknya dialihkan kepada SPPG yang mengandalkan mekanisme informal. Ini adalah bentuk nyata dari apa yang Freeman sebut sebagai ketidakseimbangan principal-agent yang perlu dikelola secara proaktif.

Ketiga, kesenjangan regulasi antara kerangka hukum nasional yang komprehensif dengan ketiadaan regulasi daerah yang mengoperasionalkan kerangka tersebut dalam konteks spesifik Kabupaten Bangkalan. Perpres No. 115 Tahun 2025 membuka peluang pendanaan dari APBD, namun tanpa Perda atau regulasi daerah yang mewajibkan alokasi tersebut, peluang ini tidak dapat dimanfaatkan secara sistematis. Kondisi ini menyebabkan program MBG di Bangkalan sepenuhnya bergantung pada keandalan sistem APBN, tanpa penyangga dari anggaran daerah.

Keempat, kesenjangan sistem informasi yang menghambat pengelolaan anggaran yang efektif. Koordinasi antara SPPG, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan DPRD dalam konteks perencanaan dan pengawasan anggaran masih dilakukan melalui jalur informal, dominan melalui WhatsApp, tanpa sistem pelaporan digital terintegrasi. Kondisi ini tidak hanya memperlambat arus informasi keuangan, tetapi juga

meningkatkan risiko kesalahan data dan menurunkan kapasitas seluruh stakeholder untuk melakukan evaluasi berbasis bukti terhadap efisiensi penggunaan anggaran program.

Peneliti berpandangan bahwa penguatan aspek anggaran Program MBG di Kabupaten Bangkalan memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis-administratif, melainkan harus bersifat politis-kelembagaan. Artinya, perbaikan mekanisme pencairan dan sistem VA oleh BGN perlu dibarengi dengan langkah-langkah penguatan tata kelola daerah: pembentukan regulasi daerah, formalisasi peran OPD, peningkatan fungsi pengawasan DPRD, dan pembangunan sistem informasi yang memungkinkan koordinasi lintas stakeholder secara transparan dan akuntabel. Tanpa integrasi antara kedua dimensi tersebut, Program MBG berisiko terus bergantung pada ketahanan personal para pelaksana lapangan, bukan pada ketahanan sistem, yang tentu saja tidak dapat diandalkan sebagai fondasi keberlanjutan program jangka panjang.

Dengan demikian, keberhasilan aspek anggaran Program MBG di Kabupaten Bangkalan tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan dana dari APBN, melainkan pada kemampuan seluruh ekosistem stakeholder untuk memastikan bahwa dana tersebut mengalir tepat waktu, dikelola secara transparan, diawasi secara proaktif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, terutama kepada 2.345 penerima manfaat yang setiap harinya menggantungkan kebutuhan gizi mereka pada kelancaran sistem ini.

Tabel 4.7 Rekonstruksi Struktur Biaya per Penerima Manfaat
Berdasarkan Data Lapangan SPPG Kodim 0829 dan Juknis BGN (Juni 2026)

No.	Komponen Biaya	Ketentuan Juknis BGN	Data Lapangan (Juni 2026)	Keterangan
1	Bahan Baku Pangan	Bagian dari pagu Rp15.000 (at cost)	Rp31.357.000 untuk satu pengiriman (2.345 penerima) $\approx$ Rp13.370/porsi	Proporsional; sesuai prinsip at cost
2	Biaya Operasional Riil (at cost)	Bagian dari pagu Rp15.000 (at cost)	Tidak dirinci terpisah dalam dokumen lapangan	Belum dapat diverifikasi secara terpisah
3	Insentif Fasilitas SPPG	Rp6.000.000/hari (availability-based), bagian dari pagu Rp15.000; ekuivalen Rp2.000/porsi	Tidak disebutkan secara eksplisit dalam data lapangan	Perlu klarifikasi; kemungkinan tidak tersosialisasikan kepada pengelola SPPG

No.	Komponen Biaya	Ketentuan Juknis BGN	Data Lapangan (Juni 2026)	Keterangan
		pada kapasitas 3.000 penerima		secara lengkap
4	Total Pagu per Penerima	Rata-rata Rp15.000/hari/penerima manfaat	Rp13.370 (bahan baku) + biaya operasional + insentif (tidak terdokumentasi) = total tidak dapat dihitung	Data lapangan tidak lengkap untuk rekonstruksi penuh struktur biaya

Sumber : Data olahan peneliti, 2026

Mengacu pada kerangka di tabel 4.14, pembahasan ini akan menganalisis ⁴⁸implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan dari lima aspek utama: (1) batasan peran masing-masing aktor; (2) tingkat kepentingan dan pengaruh yang dimiliki; (3) pola hubungan dan koordinasi antar stakeholder; (4) tantangan yang dihadapi; serta (5) strategi optimalisasi yang diperlukan. Setiap stakeholder akan dianalisis melalui tiga lensa: rangkuman temuan di lapangan, analisis teoritis berbasis Freeman, dan masukan strategis bagi perbaikan program.

Tabel 4.8 Pemetaan Stakeholder Program MBG Kabupaten Bangkalan dalam
Matriks Kekuasaan–Kepentingan Freeman

Stakeholder	Kategori (Freeman)	Kuadran Matriks	Pengaruh	Kepentingan
SPPG Kodim 0829	Primer / Key Player	Manage Closely (Tinggi–Tinggi)	Tinggi	Tinggi
Dinas Kesehatan	Sekunder	Keep Satisfied (Tinggi–Rendah)	Rendah	Tinggi
Dinas Pendidikan	Sekunder	Keep Satisfied (Tinggi–Rendah)	Rendah	Tinggi
DPRD Komisi D	Sekunder / Pengawas	Keep Satisfied (Tinggi–Rendah)	Tinggi	Rendah
Penerima Manfaat (Siswa, Posyandu)	Primer / Subjects	Keep Informed (Rendah–Tinggi)	Rendah	Tinggi

*Keterangan: *Kepentingan rendah bersifat operasional-harian, namun kepentingan makro (pengawasan kebijakan publik) tetap tinggi.*

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2026.

Tabel 4.9 Ringkasan Pola Koordinasi Antarstakeholder Program MBG
Kabupaten Bangkalan

Relasi Stakeholder	Mekanisme Koordinasi	Sifat Koordinasi	Tantangan Utama
BGN → SPPG	Juknis, SK, laporan periodik	Formal, vertikal	Keterlambatan pencairan anggaran
SPPG ↔ Sekolah	MoU, BAST, jadwal distribusi	Formal, horizontal	Kualitas bahan baku sesekali dikeluhkan
SPPG ↔ Posyandu	Jadwal buka Posyandu, data 3B	Semi-formal	Sinkronisasi jadwal distribusi
SPPG ↔ Dinas Kesehatan	Supervisi, inspeksi sanitasi, data gizi	Formal, vertikal terbatas	Tidak ada tugas khusus yang terdefinisi jelas
SPPG ↔ Dinas Pendidikan	Data siswa, edukasi awal	Semi-formal	Minimnya keterlibatan pasca distribusi
OPD ↔ OPD (lintas sektor)	Satgas MBG (2025)	Formal, berkembang	Belum ada sistem pelaporan digital terintegrasi

Relasi Stakeholder	Mekanisme Koordinasi	Sifat Koordinasi	Tantangan Utama
DPRD ↔ SPPG/OPD	Rapat koordinasi, reses, rekomendasi	Formal, reaktif	Pengawasan belum bersifat proaktif dan berkelanjutan
SPPG ↔ UMKM Pemasok	Sistem Pre-Order, e-purchase/tunai	Kontraktual, ekonomi	Keterlambatan pembayaran akibat kendala anggaran

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2026.

Tabel 4.10 Matriks Batasan Peran, Posisi Freeman, dan Strategi Optimalisasi Stakeholder Program MBG Kabupaten Bangkalan

Stakeholder	Posisi Freeman	Batasan Peran Saat Ini	Strategi Optimalisasi
SPPG Kodim 0829	Key Player	Menanggung risiko keterlambatan anggaran; koordinasi eksternal belum maksimal	Percepatan mekanisme pencairan anggaran; penguatan MoU dengan semua mitra; pelatihan manajemen krisis operasional

Stakeholder	Posisi Freeman	Batasan Peran Saat Ini	Strategi Optimalisasi
Dinas Kesehatan	Keep Informed	Peran supervisi belum terdefinisi dengan jelas; tidak ada tugas khusus tertulis	Penyusunan SOP peran Dinas Kesehatan; integrasi data gizi Puskesmas dengan sistem SPPG; penguatan evaluasi periodik
Dinas Pendidikan	Keep Informed	Hanya terlibat di edukasi awal; pasif pasca distribusi dimulai	Pengembangan peran monitoring di sekolah; integrasi program GSS dengan MBG; penguatan komunikasi dengan wali murid
DPRD Komisi D	Keep Satisfied	Pengawasan reaktif; tidak ada perda pendukung; intensitas rapat masih rendah	Penyusunan Perda MBG daerah; peningkatan frekuensi pengawasan rutin; pembentukan tim monitoring khusus MBG

Stakeholder	Posisi Freeman	Batasan Peran Saat Ini	Strategi Optimalisasi
Penerima Manfaat	Subjects / Keep Informed	Tidak ada mekanisme umpan balik formal; keluhan tidak terdokumentasi	Pembentukan mekanisme pengaduan formal; survei kepuasan berkala; pelibatan komite sekolah dalam evaluasi menu
UMKM / Pemasok	Monitor	Rentan terhadap keterlambatan pembayaran; standar kualitas belum selalu terpenuhi	Kontrak jelas dengan klausul pembayaran tepat waktu; pendampingan pemenuhan standar BGN; pengembangan database pemasok lokal terverifikasi

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2026.

Berdasarkan analisis menyeluruh menggunakan kerangka Stakeholder Analysis Freeman, implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bangkalan memperlihatkan ekosistem stakeholder yang cukup kompleks dengan dinamika hubungan yang sedang dalam proses pematangan kelembagaan. Dari sisi capaian, program telah berhasil menjangkau 2.345 penerima manfaat secara

rutin dan memberikan dampak positif yang terukur pada aspek gizi, motivasi belajar, dan kondisi ekonomi rumah tangga penerima. Tertib operasional yang dijalankan SPPG Kodim 0829, didukung oleh dokumentasi BAST dan sistem distribusi yang terjadwal, mencerminkan adanya fondasi pelaksanaan yang kuat.

Namun, dari perspektif manajemen stakeholder Freeman, terdapat empat tantangan struktural yang perlu segera diatasi. Pertama, ketidakseimbangan beban dan risiko, di mana SPPG sebagai key player menanggung risiko operasional yang terlalu besar tanpa mekanisme penyangga yang memadai. Kedua, lemahnya koordinasi horizontal antarstakeholder, yang terlihat dari minimnya dialog terstruktur antara SPPG, OPD, dan penerima manfaat. Ketiga, absennya sistem informasi terpadu yang menyebabkan data program tersebar dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengambilan keputusan. Keempat, belum terdefinisinya peran stakeholder sekunder (OPD dan DPRD) secara eksplisit dalam regulasi daerah, yang mengakibatkan keterlibatan mereka cenderung parsial dan reaktif.

Freeman (1984) menekankan bahwa program yang berkelanjutan adalah program yang mampu membangun dan memelihara nilai bersama (shared value) di antara semua stakeholdernya. Dalam konteks Program MBG Bangkalan, pembangunan nilai bersama tersebut memerlukan tiga langkah strategis utama: (1) formalisasi peran dan tanggung jawab setiap stakeholder melalui regulasi daerah yang komprehensif; (2) pembangunan infrastruktur koordinasi yang memungkinkan komunikasi lintas sektor secara real-time dan transparan; serta (3) penguatan mekanisme partisipasi penerima manfaat agar kelompok subjek dapat berkontribusi aktif dalam siklus evaluasi dan perbaikan program. Dengan langkah-langkah tersebut, ¹¹³ Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bangkalan memiliki potensi untuk berkembang dari sekadar program distribusi

pangan menjadi kebijakan pembangunan manusia yang komprehensif dan berkelanjutan.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Stakeholder Analysis dalam implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

9

1. Pemetaan dan Identifikasi Stakeholder dalam Implementasi MBG

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan melibatkan berbagai aktor yang dapat diklasifikasikan berdasarkan kerangka Stakeholder Analysis Freeman (1984) ke dalam tiga kategori. Stakeholder kunci (key stakeholder) dipegang oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kodim 0829, yang menempati posisi sentral dalam matriks kekuasaan-kepentingan sebagai Manage Closely atau Key Player. SPPG bertanggung jawab atas seluruh rantai layanan program mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan bahan pangan, pengolahan, distribusi, hingga pelaporan kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Stakeholder prime²⁴ meliputi SDN Kraton 1 dan SMPN 1 Bangkalan sebagai satuan pendidikan penerima manfaat, serta kelompok Posyandu yang mencakup balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Adapun stakeholder sekunder terdiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, dan DPRD Komisi D Kabupaten Bangkalan, yang berperan dalam pengawasan, koordinasi, dan fasilitasi program.

2. Kepentingan dan Pengaruh Aktor Pemangku Kebijakan MBG

Setiap stakeholder memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda-beda dalam implementasi kebijakan MBG. SPPG memiliki kepentingan dan pengaruh tertinggi karena menguasai sumber daya fisik, manusia, dan operasional yang dibutuhkan dalam produksi serta distribusi makanan harian. Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan memiliki kepentingan tinggi namun pengaruh yang relatif terbatas dalam pengambilan keputusan strategis, karena sebagian besar kewenangan berada di bawah koordinasi BGN. DPRD Komisi D memiliki pengaruh kelembagaan yang signifikan melalui fungsi pengawasan dan

legitimasi politik, namun keterlibatan operasionalnya masih bersifat reaktif dan periodik. Sementara itu, penerima manfaat seperti siswa, tenaga pendidik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan kelompok dengan kepentingan tertinggi namun pengaruh terendah, sehingga dikategorikan sebagai Subjects dalam matriks Freeman. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan dan pengaruh yang perlu diperhatikan dalam desain kebijakan ke depan.

3. Pola Hubungan dan Koordinasi Antarstakeholder

Pola hubungan dan koordinasi antarstakeholder dalam implementasi MBG di Kabupaten Bangkalan menunjukkan dinamika yang sedang dalam proses pematangan kelembagaan. Koordinasi antara BGN dan SPPG bersifat formal dan vertikal melalui petunjuk teknis, surat keputusan, dan laporan periodik. Hubungan antara SPPG dan sekolah penerima manfaat dilakukan melalui Memorandum of Understanding (MoU) dan mekanisme Berita Acara Serah Terima (BAST) yang berjalan secara konsisten dan tertib. Koordinasi lintas OPD difasilitasi oleh tim Satgas MBG yang baru dibentuk pada akhir tahun 2025. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam pola koordinasi yang ada, yaitu: (a) sistem pelaporan digital yang belum terintegrasi, di mana komunikasi antarinstansi masih banyak dilakukan melalui aplikasi pesan informal; (b) tidak adanya mekanisme umpan balik formal bagi penerima manfaat; (c) koordinasi yang cenderung reaktif daripada proaktif terutama pada DPRD; serta (d) belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mekanisme pendanaan dan koordinasi program MBG secara spesifik di Kabupaten Bangkalan.

4. Strategi Optimalisasi Peran Stakeholder dalam Efektivitas Kebijakan MBG

Berdasarkan analisis kerangka Freeman, terdapat empat tantangan struktural utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi Program MBG di Kabupaten Bangkalan. Pertama, ketidakseimbangan beban dan risiko, di mana SPPG sebagai key player menanggung risiko operasional yang tidak proporsional, terutama dalam menghadapi keterlambatan pencairan anggaran yang memaksanya menggunakan mekanisme talangan informal kepada pemasok. Kedua, lemahnya koordinasi horizontal antarstakeholder yang terlihat dari minimnya dialog terstruktur antara SPPG, OPD, dan penerima manfaat. Ketiga, absennya sistem informasi terpadu yang menyebabkan data program

tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Keempat, belum terdefinisinya peran stakeholder sekunder secara eksplisit dalam regulasi daerah, yang mengakibatkan keterlibatan mereka cenderung parsial dan bersifat reaktif.

Secara keseluruhan, Program MBG di Kabupaten Bangkalan telah berhasil menjangkau 2.345 penerima manfaat secara rutin dan memberikan dampak positif yang terukur, mencakup peningkatan motivasi kehadiran dan belajar siswa, efek ekonomi positif pada rumah tangga penerima, penerimaan yang baik terhadap kualitas menu, serta potensi kontribusi pada penurunan stunting yang prevalensinya telah menurun signifikan dari 26,2% pada tahun 2022 menjadi 10,2% pada tahun 2023. Namun, keberlanjutan program masih sangat bergantung pada komitmen personal tim pelaksana, bukan pada sistem kelembagaan yang kuat dan mandiri

61

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian di atas, peneliti rumuskan beberapa saran yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bangkalan:

13

1. Bagi Badan Gizi Nasional (BGN)

Badan Gizi Nasional perlu mempercepat dan memastikan keandalan sistem pencairan anggaran melalui Virtual Account (VA) SPPG agar tidak terjadi keterlambatan yang memaksa pelaksana menggunakan mekanisme talangan informal. Sistem auto top-up yang telah dirancang dalam regulasi perlu dioperasikan secara penuh dan konsisten sejak hari pertama program berjalan. Selain itu, BGN perlu memperjelas dan memformalisasi peran serta tanggung jawab setiap stakeholder daerah dalam petunjuk teknis yang lebih komprehensif, termasuk peran Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan DPRD dalam siklus perencanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran program.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan"),

97

Pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) atau setidaknya Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur

mekanisme pendanaan, koordinasi, dan pertanggungjawaban Program MBG di tingkat daerah. Regulasi daerah ini penting untuk: (a) membuka peluang alokasi APBD sebagai ¹⁵⁰nyangga ketika dana APBN mengalami keterlambatan; (b) mempertegas peran dan tanggung jawab masing-masing OPD dalam siklus pengelolaan program; serta (c) memberikan landasan hukum bagi pengawasan DPRD yang lebih rutin dan proaktif. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu memperkuat kapasitas tim Satgas MBG yang telah dibentuk agar dapat berfungsi secara optimal sebagai koordinator lintas sektor.

3. Bagi SPPG Kodim 0829,

SPPG Kodim 0829 perlu mengembangkan dan memperkuat beberapa aspek operasional. Pertama, membangun mekanisme pengaduan formal yang responsif bagi penerima manfaat untuk melaporkan insiden kualitas makanan secara terdokumentasi dan mendapatkan respons yang terstruktur, mengingat temuan adanya kontaminasi fisik pada bahan pangan yang hanya disampaikan secara informal. Kedua, memperkuat protokol inspeksi bahan baku, khususnya untuk produk yang dikonsumsi tanpa proses pemanasan seperti buah dan susu UHT. Ketiga, mengembangkan format BAST khusus untuk distribusi ke kelompok Posyandu agar akuntabilitas distribusi berjalan secara setara untuk semua kelompok sasaran program. Keempat, mulai membangun sistem operasional yang tidak bergantung sepenuhnya pada komitmen personal pengurus, melainkan pada prosedur dan sistem yang terlembaga.\

4. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan

Dinas Kesehatan perlu memformalkan perannya dalam Program MBG melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, mencakup jadwal supervisi ke lapangan, mekanisme evaluasi standar porsi dan menu gizi, serta integrasi data status gizi penerima manfaat dari Puskesmas dan Posyandu ke dalam sistem informasi SPPG. Dinas Kesehatan juga perlu membangun sistem pemantauan dampak program yang terstruktur, mencakup pengukuran indikator antropometri siswa per semester, data status gizi kelompok 3B, dan pemantauan perubahan prevalensi stunting di wilayah penerima manfaat. Selain itu, Dinas Kesehatan perlu meningkatkan intensitas edukasi gizi kepada orang tua, masyarakat, dan tenaga pendidik sebagai bentuk penguatan program secara berkelanjutan.

5. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan

Dinas Pendidikan perlu meningkatkan keterlibatannya dalam Program MBG melampaui sekadar edukasi awal sebelum program berjalan. Peran aktif Dinas Pendidikan diperlukan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan MBG di sekolah secara berkala, pengintegrasian program MBG dengan Gerakan Sekolah Sehat (GSS), serta penguatan komunikasi dengan orang tua siswa terkait pentingnya pola konsumsi bergizi yang sejalan dengan program. Selain itu, Dinas Pendidikan perlu memastikan akurasi dan pemutakhiran data peserta didik secara berkala agar basis data penerima manfaat yang digunakan dalam penghitungan anggaran selalu sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

6. Bagi DPRD Komisi D Kabupaten Bangkalan

DPRD Komisi D perlu menggeser fungsi pengawasannya dari reaktif menjadi proaktif dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan tim monitoring khusus yang melakukan pemantauan rutin pelaksanaan MBG secara terjadwal, tidak hanya ketika terjadi permasalahan yang viral di media sosial. DPRD juga perlu mendorong penyusunan regulasi daerah yang mendukung Program MBG, termasuk mendorong alokasi APBD sebagai penyangga operasional dan memperkuat mekanisme pengawasan anggaran yang transparan dan akuntabel. Selain itu, DPRD perlu memperkuat perannya sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah daerah, khususnya dalam menyampaikan masukan dari penerima manfaat yang selama ini tidak memiliki saluran formal untuk menyuarakan kebutuhan dan keluhan mereka

7. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan wilayah yang terfokus pada Kabupaten Bangkalan serta keterbatasan data kuantitatif untuk mengukur dampak program secara terukur. Peneliti selanjutnya disarankan untuk: (a) melakukan penelitian komparatif lintas kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai variasi implementasi MBG; (b) mengembangkan penelitian evaluatif berbasis data kuantitatif yang mengukur dampak program secara empiris, seperti perubahan indikator antropometri, tingkat kehadiran siswa, dan status gizi kelompok 3B; (c) mengkaji implementasi Program MBG dalam perspektif teori lain seperti Network Governance atau Collaborative Governance untuk memperkaya

perspektif analitik; serta (d) melakukan penelitian longitudinal yang mengikuti perkembangan program dalam jangka waktu lebih panjang untuk menilai keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang program.

ORIGINALITY REPORT

11%	9%	6%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Jihan Fasabilla, Tiara Novita Sari, Shalina Niswa Ayyanus Saqi, Afifah Ulfatul Fauziyah, Dinda Shabrina Aini. "Analisis Kinerja Dan Budaya Organisasi SPPG Dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis", Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 2026 Publication	<1%
2	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
3	infopublik.id Internet Source	<1%
4	Submitted to Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Student Paper	<1%
5	www.antaranews.com Internet Source	<1%
6	cdn-web.bgn.go.id Internet Source	<1%
7	es.scribd.com Internet Source	<1%
8	www.scribd.com Internet Source	

<1 %

9

Ratna Septianingsih, Tri Astuti, Rizki Rahmandani, Tisyani Hulvia Suraya, Vannya Kiara Ajie. "Dinamika Kelembagaan dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Karanganyar : Perspektif Modal Sosial dan Biaya Transaksi", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026
Publication

<1 %

10

peraturan.go.id
Internet Source

<1 %

11

Submitted to UPN Veteran Yogyakarta
Student Paper

<1 %

12

qdoc.tips
Internet Source

<1 %

13

id.wikisource.org
Internet Source

<1 %

14

pakagus.com
Internet Source

<1 %

15

Andre Notohamijoyo, Andi Soesmono, Adhi Setya Wiyata. "Pemanfaatan Media Baru Sebagai Strategi Promosi Gerakan Makan Ikan untuk Mengatasi Masalah Stunting di Indonesia", Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains, 2024
Publication

<1 %

16

farmasiku.or.id
Internet Source

<1 %

17

docplayer.info

Internet Source

<1 %

18

Anugerah Mulia Utami, Nurul Uswatun Hasanah, Eko Rachmat Saputro, Adela Anita. "Legitimasi Negara dan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wilayah Pedalaman Papua Selatan", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2026

Publication

<1 %

19

Submitted to Abdullah Gul University

Student Paper

<1 %

20

[mail.bajangjournal.com](mailto:bajangjournal.com)

Internet Source

<1 %

21

www.bgn.go.id

Internet Source

<1 %

22

Rika Yuanita Pratama, Ria Damayanti, Lea Masan, Yolanda Montessori, Yunida Haryanti. "Penguatan kesehatan ibu dan anak pada periode 1000 HPK untuk pencegahan stunting", JOURNAL of Public Health Concerns, 2026

Publication

<1 %

23

jurnalistiqomah.org

Internet Source

<1 %

24

www.swarantt.net

Internet Source

<1 %

25

Submitted to Universitas Nusa Cendana

Student Paper

<1 %

26	abunali84.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	Dwi Shofarina Indriani Khoirunnisa Maghfiroh, Febryliana Pratiwi, Alif Rama Nugroho, Aufa Abiyyu, Nina Farliana. "Implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai Strategi Investasi Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kesehatan dan Kualitas Pendidikan", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
28	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
29	berita.jepara.go.id Internet Source	<1 %
30	ejournal.stainpamekasan.ac.id Internet Source	<1 %
31	indocybernews.com Internet Source	<1 %
32	jurnal.optimaluntuknegeri.com Internet Source	<1 %
33	www.kkji.kp3k.kkp.go.id Internet Source	<1 %
34	Submitted to Binus University International Student Paper	<1 %
35	Muhamad Iqbal Wibisono, Sedya Santosa. "Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Meningkatkan Ketahanan Gizi	<1 %

Pelajar di Indonesia", RIGGS: Journal of
Artificial Intelligence and Digital Business,
2026

Publication

36

Zahra Najwa Salsabila, Hendra Riofita.
"Urgensi pendapatan nasional dalam
pengambilan keputusan ekonomi publik di
era modern", RIGGS: Journal of Artificial
Intelligence and Digital Business, 2026

Publication

<1 %

37

www.terbitindo.com

Internet Source

<1 %

38

Submitted to FAKULTAS HUKUM

Student Paper

<1 %

39

eprints.uny.ac.id

Internet Source

<1 %

40

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %

41

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

42

journal.universitaspahlawan.ac.id

Internet Source

<1 %

43

Khotibul Imam, Husnul Madihah, Didi
Susanto. "STRATEGI MANAJEMEN
PENGELOLAAN MAKAN BERGIZI GRATIS
(MBG) DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DI SMP
NEGERI 3 MURUNG PUDAK", Jurnal
Terapung : Ilmu - Ilmu Sosial, 2026

Publication

<1 %

44	Mokhammad Mahbub Chaizurrohman, Anik Sulistiyawati. "Penerapan Sistem FIFO (First In First Out) dalam Menjamin Konsistensi Kualitas Produk Pengolahan Pangan di Dapur Makan Bergizi Gratis Wilayah Warungdowo Kabupaten Pasuruan", Jurnal Teknik Industri Terintegrasi, 2025 Publication	<1 %
----	---	------

45	eprints.pancabudi.ac.id Internet Source	<1 %
----	--	------

46	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
----	--	------

47	sumut.indopolitika.com Internet Source	<1 %
----	--	------

48	Amelisa Sipayung, Hilma Hermen, Aurik Mathias D Purba, Johan Paulo Sinaga, Ondo Apostel Purba. "Peran Pelatihan Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Program (MBG) Makan Bergizi Gratis", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
----	--	------

49	Submitted to Fakultas ISIP Student Paper	<1 %
----	---	------

50	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1 %
----	---	------

51	Submitted to LPPM Student Paper	<1 %
----	------------------------------------	------

52	Suardi Suardi, Amy Syah Purmadani. "MAKAN BERGIZI GRATIS DAN DAMPAK BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI", Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2025 Publication	<1 %
----	---	------

53	repository.its.ac.id Internet Source	<1 %
----	---	------

54	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Student Paper	<1 %
----	--	------

55	Nina Kristiani, Rahmat Alyakin Dakhi, Frida Lina Tarigan, Donal Nababan, Lia Rosa Sinaga. "PERSEPSI SISWA, GURU, DAN ORANG TUA TERHADAP MAKANAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 TELUK DALAM DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA BINTANG LAUT TELUK DALAM TAHUN 2026", PREPOTIF : JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT, 2026 Publication	<1 %
----	--	------

56	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
----	--	------

57	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1 %
----	--	------

58	birohukum.bappenas.go.id Internet Source	<1 %
----	---	------

59	dprd.banyuwangikab.go.id Internet Source	<1 %
----	---	------

60	ikpi.or.id Internet Source	<1 %
61	jurnal.muaraedukasi.id Internet Source	<1 %
62	kaltim.prokal.co Internet Source	<1 %
63	www.bangkalankab.go.id Internet Source	<1 %
64	betabiro2.antaranews.com Internet Source	<1 %
65	eprints.upnyk.ac.id Internet Source	<1 %
66	harianbangsa.net Internet Source	<1 %
67	jdih-stg.bgn.go.id Internet Source	<1 %
68	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
69	surabayapost.id Internet Source	<1 %
70	Submitted to Gyeongsang National University Student Paper	<1 %
71	Titis Putri Pinasti, Lalu Mariawan Alfarizi. "Koperasi sebagai Pilar Pengadaan Makanan Bergizi Gratis", Journal Juridisch, 2025 Publication	<1 %

72	ambon.antaranews.com Internet Source	<1 %
73	bgn.go.id Internet Source	<1 %
74	dispusip.pekanbaru.go.id Internet Source	<1 %
75	ejurnal.ung.ac.id Internet Source	<1 %
76	kuninganmass.com Internet Source	<1 %
77	www.gelora.co Internet Source	<1 %
78	Submitted to Trisakti University Student Paper	<1 %
79	beritajatim.com Internet Source	<1 %
80	docobook.com Internet Source	<1 %
81	docs.wfp.org Internet Source	<1 %
82	jdih.bgn.go.id Internet Source	<1 %
83	klikwarta.com Internet Source	<1 %
84	kodim0601-pandeglang.com Internet Source	<1 %
85	pknstan.ac.id	

86

pojokkata.com

Internet Source

<1 %

87

poskota.co.id

Internet Source

<1 %

88

ppid.dephub.go.id

Internet Source

<1 %

89

repository.uir.ac.id

Internet Source

<1 %

90

www.cnnindonesia.com

Internet Source

<1 %

91

www.pertanian.go.id

Internet Source

<1 %

92

Elisa Widyastari, Chrismis Novalinda Ginting, Ali Napiah Nasution. "Implementasi Program Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kota Tebing Tinggi", MAHESA : Malahayati Health Student Journal, 2024

Publication

<1 %

93

Submitted to IAIN Bukit Tinggi

Student Paper

<1 %

94

Narlhiandini Mitresna Widyadhana, Resti Anisha Putry, Narlhiandini Mitresna Widyadhana. "TINJAUAN NILAI GIZI DARI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) PRESIDEN RI", Jurnal Kesehatan Tambusai, 2025

Publication

<1 %

95	anzdoc.com Internet Source	<1 %
96	beritagram.home.blog Internet Source	<1 %
97	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	<1 %
98	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
99	id.scribd.com Internet Source	<1 %
100	kupdf.net Internet Source	<1 %
101	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
102	media.neliti.com Internet Source	<1 %
103	satumenitnews.com Internet Source	<1 %
104	trustsulteng.com Internet Source	<1 %
105	upnyk.ac.id Internet Source	<1 %
106	www.kompas.com Internet Source	<1 %
107	www.maduracorner.com Internet Source	<1 %
108	123dok.com	

-
- 109 Atiek Pratiwi Putri Naue, Siti Rifqa Raihani, Irsyaf Marsal. "Perbandingan Yuridis Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pangan: Studi Komparatif Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia dan Mid-Day Meal Scheme di India", AHKAM, 2026

Publication

<1 %

-
- 110 Atika Oktarina, Budi Setiawan. "Tantangan Manajerial Calon Kepala SPPG dalam Mengelola SPPG di Sumatera Bagian Selatan: Studi Tentang Strategi dan Kinerja", Jurnal Pariwisata dan Perhotelan, 2025

Publication

<1 %

-
- 111 Deka Buana Putri Deka, Lusia Asih Wulandari, Dri Rahayu, Ririn Wulandari, Vivian Nani Lia Dewi. "PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE LAYANAN INFORMASI DAN PEMANTAUAN BALITA STUNTING DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PULAU PANGGUNG", PREPOTIF : JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT, 2026

Publication

<1 %

-
- 112 Maulida Winda, Anggi Safitri, Afrijal. "Collaborative Governance Model Kolaborasi Pemerintahan Dalam Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Di Pemerintahan Daerah", Indonesian Journal of Public Administration Review, 2026

Publication

<1 %

113	Musdalifah Nor Amini, Ayun Sriatmi, Apoina Kartini. "Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Makanan Bergizi di Sekolah Dasar di Indonesia: Scoping Review", Jurnal Ners, 2025 Publication	<1 %
114	Purwandiyarti Apriliani, Dartiwen Dartiwen, Feriyal Feriyal. "Evaluasi Keterpaduan Program Bina Keluarga Balita, Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini Menggunakan Logic Model di Kabupaten Indramayu", Jurnal Ners, 2025 Publication	<1 %
115	Rahma Wijayanti, Difa Khusniyah, Muqita Hanifah Hasanah Dilia, Wildani Aulia Fitri, Suhardi. "Sistem Distribusi MBG di SMP Falatehan Contoh Praktik Pembelajaran Sistem Kolaborasi yang Efektif di Sekolah", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2025 Publication	<1 %
116	aceh.tribunnews.com Internet Source	<1 %
117	aguskrisnoblog.wordpress.com Internet Source	<1 %
118	bagasprastha.blogspot.com Internet Source	<1 %
119	crispycritterslasvegas.com Internet Source	<1 %

120	de.scribd.com Internet Source	<1 %
121	djpbb.kemenkeu.go.id Internet Source	<1 %
122	docu.bkkbndiy.id Internet Source	<1 %
123	eprints.umsida.ac.id Internet Source	<1 %
124	eprints.unimudasorong.ac.id Internet Source	<1 %
125	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
126	gresikkab.go.id Internet Source	<1 %
127	idoc.pub Internet Source	<1 %
128	infor.seaninstitute.org Internet Source	<1 %
129	issuu.com Internet Source	<1 %
130	jatengprov.go.id Internet Source	<1 %
131	journal.iftkledalero.ac.id Internet Source	<1 %
132	jurnal.itats.ac.id Internet Source	<1 %

133	kti-skripsi-kesehatan-masyarakat.blogspot.com Internet Source	<1 %
134	lampungway.com Internet Source	<1 %
135	pembekuanikankakapmerah.blogspot.com Internet Source	<1 %
136	ppsp.nawasis.info Internet Source	<1 %
137	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
138	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
139	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1 %
140	sippn.menpan.go.id Internet Source	<1 %
141	summer-absolutely.icu Internet Source	<1 %
142	tanjabtinkab.go.id Internet Source	<1 %
143	wartamataram.com Internet Source	<1 %
144	www.dianmandirifoundation.org Internet Source	<1 %
145	www.kaltimtoday.co Internet Source	<1 %

146

www.nusantarabicara.co

Internet Source

<1 %

147

yudasmara.wordpress.com

Internet Source

<1 %

148

Petrus Yohanes Ismail Arwimbar, Ulfa Rahmadani, Ilmidin Ilmidin. "Analisis Implementasi dan Kendala dalam program MBG pada pendidikan SD, SMP dan SMA Negeri di Kota Jayapura", Jurnal Ners, 2025

Publication

<1 %

149

Deni Malik, Khansa Suma Rabbani. "Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis dalam Upaya Menurunkan Angka Stunting di Depok (Studi Kasus pada SD Negeri 02 Gandul, Depok)", Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 2026

Publication

<1 %

150

Kusumanto T., Yuliani L., Macoun P., Indriatmoko Y., Adnan H.. "Belajar beradaptasi: bersama-sama mengelola hutan di Indonesia", Center for International Forestry Research (CIFOR), 2006

Publication

<1 %

151

Nadilla Zahra, Ramadani Ramadani. "Analisis yuridis terhadap undang-undang no.18 tahun 2012 tentang ketahanan pangan pada keluarga miskin dalam perspektif maqasid syariah", Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 2023

<1 %

152

Suhartini Suhartini, Delfian B. P., Rudianto Rudianto, Risma Haris, Mulya Dwi Putra M., Aldila Laraswati Saleh. "PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELOMPOK PENGGARAMAN IKAN DALAM MENINGKATKAN GIZI ANAK MELALUI INTEGRASI PANGAN FUNGSIONAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL", JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 2026

Publication

<1 %

153

journal.univpancasila.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off